



# RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 - 2024



## KATA PENGANTAR

Dalam upaya memperkuat pilar-pilar ketahanan pangan yang berbasiskan pada kemampuan sumberdaya lokal serta untuk mempertegas komitmen Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Maluku terhadap pembangunan dan pencapaian kemandirian pangan daerah yang kuat dan berkelanjutan maka Dinas Ketahanan Pangan menyusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2019 – 2024. Sebagai penjabaran dari RPJMD 2005 – 2025 Provinsi Maluku, dokumen perencanaan ini berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan pada tingkat provinsi. Pelaksanaannya dirancang selama lima tahun dan di dalamnya sekaligus dirumuskan indikator-indikator keberhasilannya sehingga realisasi program dan anggaran jelas serta dapat dievaluasi kinerja yang dicapai setiap tahun. Renstra memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penilaian atas keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dalam mengemban tugas dan fungsi dalam pembangunan ketahanan pangan daerah.

Sesuai fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program di bidang ketahanan pangan melalui tiga bidang utama, yaitu Penyediaan pangan, Distribusi pangan, dan Konsumsi & keamanan pangan.

Bagi Dinas Ketahanan Pangan, dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan ketahanan pangan daerah. Juga, dokumen ini tentu saja dapat digunakan sebagai referensi bagi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintahan Provinsi dan pihak lainnya.

Ambon, 5 Desember 2019

Kepala Dinas,

Ir. Habiba Saimima, M.Si



## DAFTAR ISI

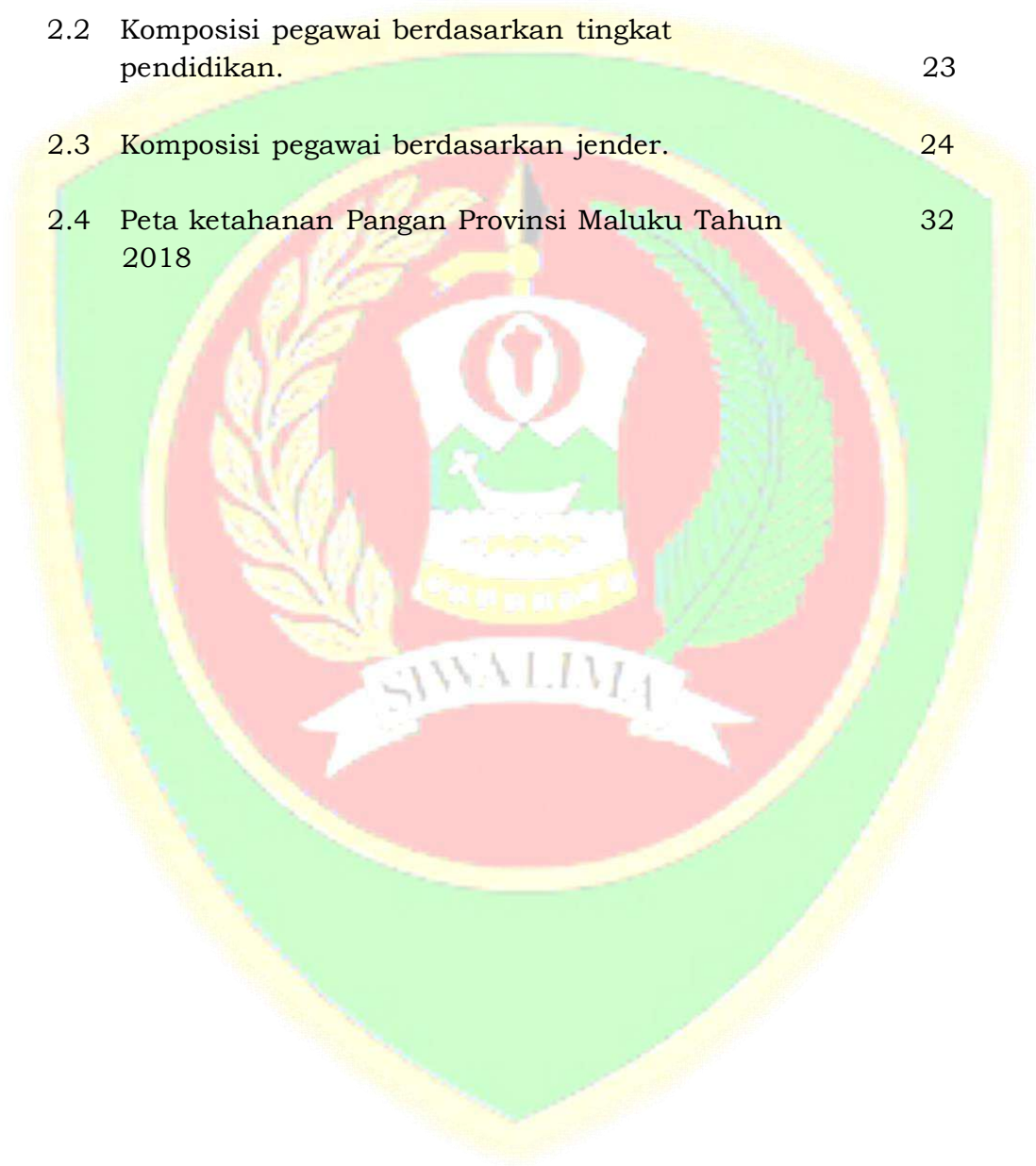
<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>DAFTAR ISI</b>		ii
<b>DAFTAR TABEL</b>		iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
	2.2. Sumber Daya	22
	2.3. Kinerja Pelayanan	28
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	35
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	3.1. Identifikasi Permasalahan	38
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur	42
	3.3. Telaahan Renstra K/L	44
	3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	48
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	50
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	53
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	5.1. Strategi dan Kebijakan	58
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN</b>	6.1. Rencana Program dan Kegiatan	62
	6.2. Pendanaan Indikatif	69
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETAHANAN PANGAN</b>	7.1. Indikator Kinerja	86
	7.2. Penetapan Indikator Kinerja	90
	7.3. Indikator Kinerja	94
<b>BAB VIII PPENUTU</b>		110

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
2.1	Sumber Daya ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Menurut Genjer.	22
2.2	ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Berdasarkan Pangkat/ Golongan.	23
2.3	Daftar Aset Barang Bergerak Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018.	25
2.4	Daftar Aset Barang Tidak Bergerak Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018.	28
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018.	30
2.6	Skor FSVA Provinsi Maluku Tahun 2018.	32
2.7	Persentase Realisasi Anggaran Periode 2015 – 2019 Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	33
2.8	Realisasi Anggaran Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2015 – 2019.	34
3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.	38
3.2	Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.	41
3.3	Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur.	43
3.4	Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.	46
3.5	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	48
3.6	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	51
3.7	Indeks Ketahanan Pangan Berkelanjutan Provinsi Maluku Tahun 2019	52
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.	55
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.	60
6.1	Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2024.	66
6.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024	70
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.	102
7.2	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD.	103

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.	21
2.2	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.	23
2.3	Komposisi pegawai berdasarkan jender.	24
2.4	Peta ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2018	32



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman bermutu dan bergizi, seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah kesatuan negara Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional maupun daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Rencana Strategi merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi; program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode lima tahun. Dokumen RPJMD bersifat makro yang memuat visi, misi, program prioritas dan rencana penganggaran. RPJMD merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah mengenai program prioritas kedepan yang akan menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor penyusunan visi, misi, dan program-program pembangunan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan urusan wajib dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2019 – 2024 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, keluarga hingga perorangan, ketahanan pangan harus di wujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk dengan memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi kompetitif dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah Provinsi Maluku sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif

dalam berbagai haluan untuk melaksanakan aksi kemanusiaan terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (*World Food Summit* (1996) dan ditegaskan kembali dalam *World Food Summit: five years later* (WFS:fyI) 2001, serta deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs) 2000 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrim/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersama-sama dengan instansi terkait lainnya berkerjasama secara sinergis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan, membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Perwujudan program pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Maluku tidak terlepas dari pengembangan kearifan lokal yang memanfaatkan sumber pangan lokal guna menopang terwujudnya kedaulatan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, dan menindak lanjuti penyampaian visi, misi dan program Gubernur Maluku 2019-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024, maka disusunlah Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 - 2024 yang merupakan suatu bagian yang utuh dari kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang dapat dijadikan sebagai acuan dan arahan untuk mengembangkan dan menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra ini menjadi komitmen Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang digunakan sebagai tolak ukur dan instrumen bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja



sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Provinsi Maluku yaitu :

**“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani,  
Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan  
Kepulauan”**

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140.4/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;



23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140.4/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/HK.140.4/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
30. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan dibidang ketahanan pangan selama lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan rencana kinerja Tahunan, RKA Perangkat Daerah dan penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Menetapkan rencana program dan kegiatan dinas ketahanan pangan disertai dengan pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang.
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi dinas ketahanan pangan selama lima tahun;
- d. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA Dinas Ketahanan Pangan;
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 disusun sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisikan latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku meliputi : tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN**

Bab ini memaparkan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2019-2024, telaahan Renstra K/L, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan untuk 5 (lima) tahun kedepan .

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini membahas tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan termasuk IKU dan indikator kinerja bidang urusan ketahanan pangan.

### **BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku**

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Sebagai lembaga teknis yang membidangi urusan wajib nonpelayanan dasar, Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan kebijakan daerah di bidang pangan.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah *“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.”*

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas maka Dinas mengemban fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan;
- d. Pembinaan teknis dibidang pangan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Gubernur untuk:

- (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku; dan
- (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Tugas Dewan meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Untuk merealisasikan fungsi Dinas maka diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 yang mengatur tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, yang deskripsinya sebagai berikut.

#### **A. SEKRETARIAT**

1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai

- dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
  - f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
  - g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang Ketahanan Pangan;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan



tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **B. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas adalah :
  - a. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, antara lain :
    1. Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan
    2. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)
    3. Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Sumberdaya Pangan Daerah
    4. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
    5. Penyusunan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), investigasi, intervensi, serta mitigasi penanganan rawan pangan / gizi buruk
    6. Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan
    7. Pengembangan Pulau Mandiri Pangan
    8. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) : investigasi, intervensi, mitigasi penanganan rawan pangan/gizi buruk/busung lapar

## 9. Pengembangan Koorporasi Usaha Tani

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. merumuskan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. melaksanakan kebijakan dan pemantapan program di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan

- meningkatkan kualitas hasil di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan ke depan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

### **C. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

1. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas adalah :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta penyiapan pemantapan program di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku guna pencapaian target kerja;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang distribusi dan cadangan pangan ke depan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **D. BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

1. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas adalah :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan ke depan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **E. BIDANG KEAMANAN PANGAN**

1. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keamanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas adalah :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Keamanan Pangan berdasarkan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan



tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

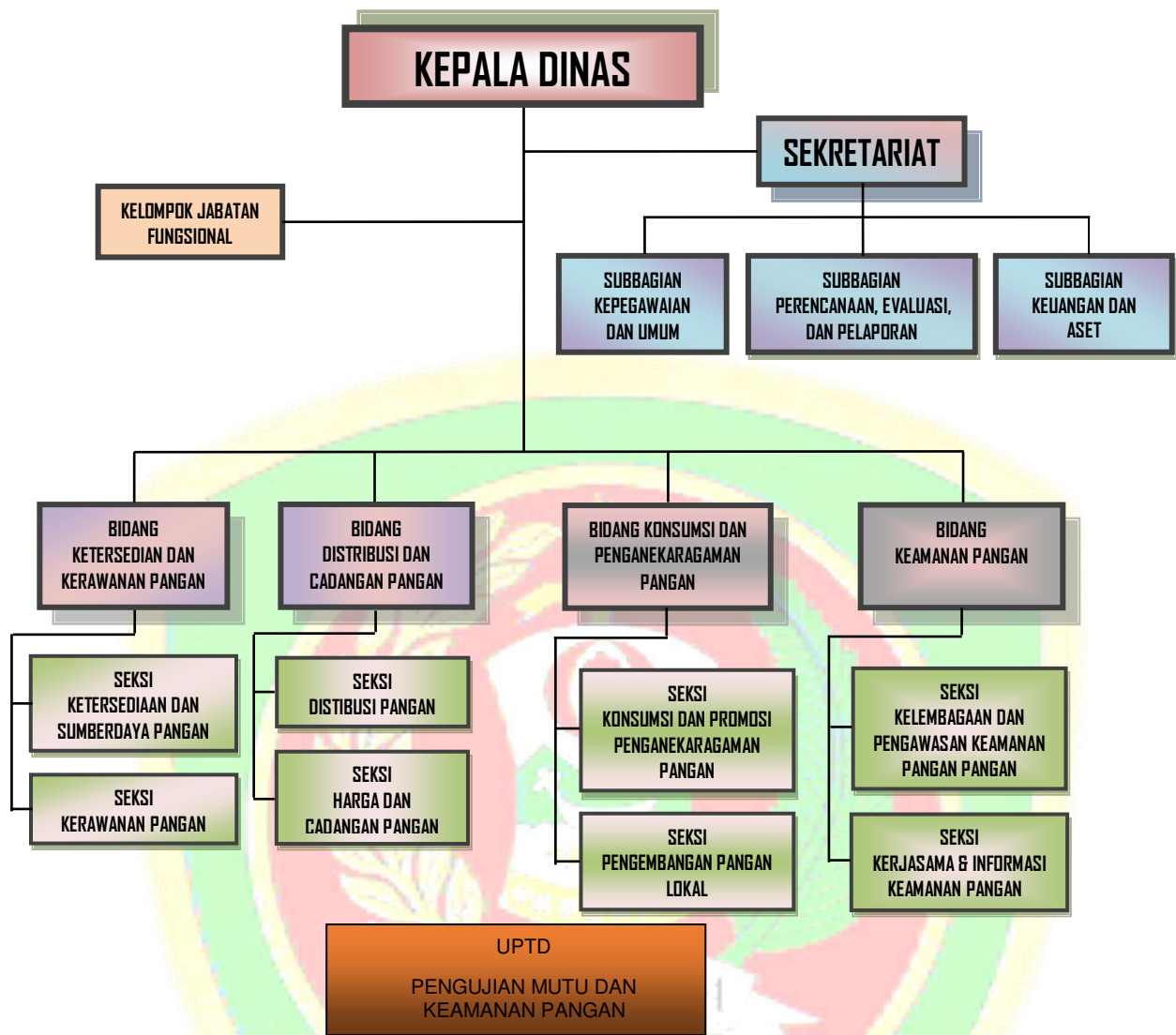
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Keamanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Keamanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Keamanan Pangan dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Keamanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang keamanan pangan ke depan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Keamanan Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri atas:
  - 1) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 3) Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang terdiri atas :
  - 1) Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan; dan
  - 2) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang terdiri atas :
  - 1) Seksi Distribusi Pangan; dan
  - 2) Seksi Harga dan Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, yang terdiri atas:
  - 1) Seksi Konsumsi dan Promosi Penganekaragaman Pangan; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- f. Bidang Keamanan Pangan, yang terdiri atas :
  - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan Pangan; dan
  - 2) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Unit lainnya dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang Sudah terbentuk adalah UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPTD seperti OKKPD pada saatnya diperlukan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan. Demikian pula halnya dengan Kelompok Jabatan Fungsional, seperti misalnya tenaga Analis Pangan, yang sampai tahun 2019 belum ada/belum diperlukan sebab Dinas belum memiliki OKKPD.

Unit nonstruktural yang juga penting bagi Dinas adalah Dewan Ketahanan Pangan (DKP). DKP merupakan unit pendukung fungsi Dinas dalam hal koordinasi lintas SKPD dan kajian bidang pangan.



## 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang tegas, transparansi, responsif, kesetaraan, visi yang strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis.

Jumlah SDM aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sebanyak 78 orang, yang terdiri atas 40 laki-laki dan 38 perempuan. Berdasarkan pangkat/golongan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dapat diperinci yakni, Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III 4 orang, Eselon IV 11 orang, staf pelaksana 44 orang, dan tenaga honorer 18 orang.

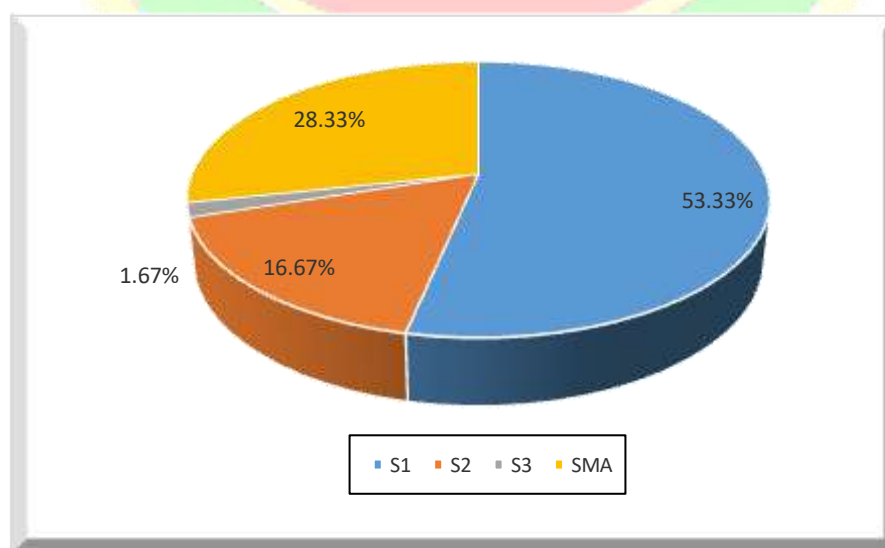
Tabel 2.1 Sumber Daya ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Menurut Genjer

URAIAN	PRIA	WANITA
ESELON II		1 ORANG
ESELON III	2 ORANG	2 ORANG
ESELON IV	7 ORANG	4 ORANG
PEJABAT FUNGSIONAL	-	-
STAF	19 ORANG	25 ORANG
HONORER	11 ORANG	7 ORANG
JUMLAH	40 ORANG	38 ORANG

Tabel 2.2 ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Berdasarkan Pangkat/Golongan.

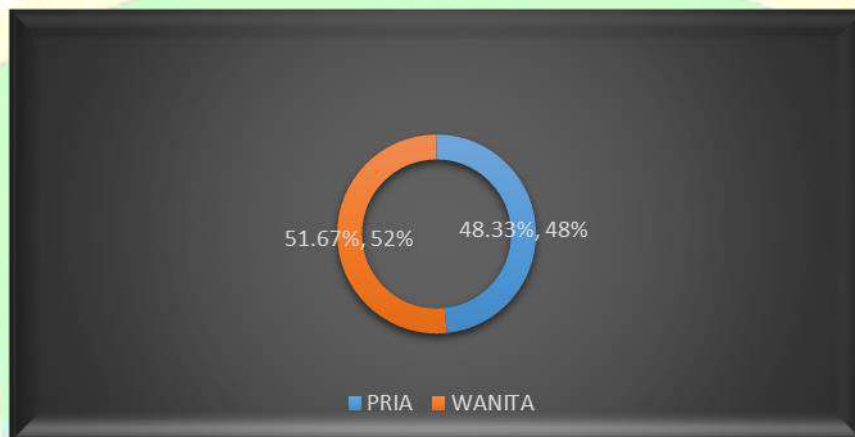
No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	IV	7	9
2.	III	48	62
3.	II	5	6
4.	I	-	-
5.	Honorar	18	23
Jumlah		78	100

Jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhir tampak bahwa sebagian besar pegawai Dinas berpendidikan sarjana (53,3%), menyusul yang berpendidikan SLTA (28,3%) dan magister (16,7%) serta selebihnya merupakan pegawai berpendidikan doktor (1,7%). Dari komposisi ini tergambar bahwa pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang berpendidikan sarjana cukup banyak, hal ini dikarenakan cukup banyak yang berpendidikan S-1 ditambah yang berpendidikan SMA yang banyak meneruskan pendidikannya ke jenjang sarjana.



Gambar 2.2 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai pria tercatat 29 orang (48,3%) dan wanita sebanyak 31 (51,7%). Tampak bahwa pegawai wanita sedikit lebih banyak daripada pegawai pria. Keterwakilan wanita sebagai staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sudah terpenuhi dalam pengarusutamaan jender yang mempersyaratkan 30% keterwakilan perempuan dalam pekerjaan suatu instansi.



Gambar 2.3 Komposisi pegawai berdasarkan jender.

Berdasarkan analisis jabatan yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian maka jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sudah mencukupi kebutuhan namun demikian ASN ini belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Ini disebabkan di antaranya karena:

- Beberapa pegawai yang seharusnya hanya menjalankan tugas teknis namun juga mengerjakan tugas lainnya (tugas rangkap); dan
- Pendistribusian pekerjaan belum sepenuhnya memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.



## 2.2.2 Sumber Daya Aset

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi maupun APBN meliputi gedung kantor, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, meubeler, sarana informasi, dan prasarana lainnya.

Tabel 2.3. Daftar Aset Barang Bergerak Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018

NO	KODE BARANG	NAMA/JENIS/MEREK/TIPE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (Rp)	JUMLAH
1	02.06.01.05.40	Alat Kantor Lainnya	2014		
		X103C		20.100.000	3
2	02.06.03.02.01	P.C. Unit			
		Acer E1-470 / Intel Pentium Dual Core	2014	7.480.000	1
3	02.06.03.02.02	Lap Top	2014		
		Asus S46CA / intel core i3		19.400.000	2
		Asus S46CA / Intel Core i5 G3220-3		9.995.000	1
		Acer V5-471G / Intel Core i5 G3220-3		9.995.000	1
		Acer V5-471G / Intel core i5		11.500.000	1
4	02.06.03.05.03	Printer	2014		
		Canon / Inkjet		1.900.000	1
		Canon / Print, Scan, Fax		3.000.000	1
5	02.07.01.02.03	Camera Electric	2014		
		Sony / Cybershot DSC-WX80		4.500.000	1
6	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	2015		
		Honda / Vario 150			
7	02.06.01.03.10	Mesin F.C.K. Biasa D/Fol	2015	30.000.000	1
		Kyocera / Taskafla 2200			
8	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2015		
		Brother / 3 laci		2.000.000	1
		Brother / 4 laci		12.000.000	4
9	02.06.01.05.28	Overhead Projector			
		Sony		10.000.000	1
		X103C		20.100.000	3
10	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	2015		
		Lokal		4.750.000	2
11	02.06.02.01.05	Kursi Besi / Metal	2015		
		Futura		5.400.000	6
12	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	2015		
		OGI		6.000.000	6

13	02.06.02.04.02	Ac Sentral	2015		
		Polytron / PSF5001		44.000.000	2
14	02.06.02.04.04	Ac. Split	2015		
		Polytron / PSF3001		17.500.000	1
		Polytron		4.500.000	1
15	02.06.02.06.49	Handy Cam	2015		
		Sony / HDR PJ 410		10.000.000	1
16	02.06.03.02.01	P.C. Unit			
		LG	2015	8.000.000	1
17	02.06.03.02.02	Lap Top	2015		
		Acer / Core i7		66.000.000	3
		Acer		10.000.000	1
		Toshiba		11.950.000	1
		Acer / Aspire		11.950.000	1
18	02.06.03.04.08	Printer	2015		
		Cannon Pixma / iP 2770		1.800.000	2
19	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	2015		
		Horse Metal		10.000.000	1
20	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	2015		
		Oggi		3.500.000	1
21	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pejabat Non Struktu	2015		
		Super		5.000.000	5
22	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	2015		
		Grand		10.000.000	1
23	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	2015		
		Anabelle		2.500.000	1
24	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pejabat Non Strukt	2015		
		Futura		3.750.000	5
25	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2015		
		LH6022		1.500.000	1
26	02.07.01.01.01	Camera+Attachment	2015		
		Cannon / EOS 1200D		7.000.000	1
27	02.07.01.01.40	Microphone / Wireless Mic	2015		
		Shure		3.000.000	2
28	02.07.01.02.03	Camera Electric	2015		
		Canon		16.900.000	2
29	02.07.01.02.03	Camera Electric	2015		
		Canon / EOS 1200D		9.380.000	1
30	02.07.02.01.10	Speaker	2015		
		Real Sound / M 15/1+		17.500.000	1 set/2 buah
31	02.07.02.06.02	Wireless Amplifier	2015		
		Shure		3.500.000	1
32	02.03.01.01.03	Station Wagon	2016		
		Toyota / Innova 2.0 G M/T Gasoline (2016)			
33	02.06.02.01.62	Korden	2016		
		Reil + Korden		14.000.000	1

34	02.06.02.06.20	Stabilizer	2016		
		Kenika (UPS) / KS-KZ		3.300.000	3
35	02.06.03.02.02	Lap Top	2016		
		Toshiba		47.000.000	5
36	02.06.03.03.12	Hardisk	2016		
		Seagate / External		1.000.000	1
37	02.06.03.04.08	Printer			
		Epson / L120	2016	5.000.000	1
38	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	2016		
		Frontline		23.000.000	1
39	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	2016		
		Frontline		7.000.000	1
40	02.03.01.01.01	Sedan	2017		
		Honda Mobilio / CVT Prestige			
41	02.05.01.02.03	Ember Plastik	2017		
		Ember besar pakai tangan		4.500.000	6
		Ember Sedang pakai tutup		4.200.000	6
42	02.05.01.06.04	Alat Prosesing Lainnya	2017		
		Yosimaru		22.500.000	1
43	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2017		
		FRONTLINE		6.000.000	6
44	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	2017		
		FRONTLINE		21.000.000	6
45	02.06.02.01.49	Sofa	2017		
		Sofa		5.000.000	1
46	02.06.02.04.03	Ac Unit	2017		
		SHARP		10.000.000	2
47	02.06.02.05.05	Alat Dapur Lainnya	2017		
		Loyang / Alumunium Besar		5.100.000	6
		Loyang / Alumunium sedang		4.800.000	6
		Nyiru Besar		2.550.000	6
		Nyiru Sedang		2.196.000	6
48	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lainnya	2017		
		Keranjang		4.350.000	2
49	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	2017		
		LOGO / MTL 01		5.500.000	1
50	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	2017		
		OVIS / 1502		27.000.000	6
51	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	2017		
		FRONTLINE		5.500.000	1
52	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	2017		
		FRONTLINE		24.000.000	6
53	02.06.04.05.04	Kursi Hadap Depan Pejabat Esel	2017		
		FRONTLINE		10.000.000	10
54	02.06.04.07.04	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2017		
		FRONTLINE		6.000.000	1
55	02.06.04.07.09	Lemari & arsip Pejabat Lainnya	2017		



		FRONTLINE / A5310		30.000.000	6
56	02.06.03.04.08	Printer			
		Epson	2017	2.000.000	1
57	02.06.03.02.01	P.C. Unit			
		Acer / All in One	2018	46.494.250	5
58	02.06.03.02.02	Lap Top	2018		
		Asus / Vivobook S410F		96.525.000	5
59	02.06.03.04.08	Printer			
		Epson / L-360	2018	6.479.000	2
60	02.06.03.06.05	Peralatan Jaringan Lainnya			
		Jaringan Website		99.825.000	1

Tabel 2.4. Daftar Aset Barang Tidak Bergerak Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018

NO	KODE BARANG	NAMA/JENIS/MEREK BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA	JUMLAH
1	03.11.01.01.01	Gedung Kantor Permanen	2015		
		Rehab Gedung (Gedung Bukan Milik Badan Ketahanan Pangan)		423.616.000	1
2	04.15.06.03.04	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya	2015		
		Instalasi Listrik Badan Ketahanan Pangan		25.000.000	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Kinerja Pelayanan yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya. indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti *Millenium Development Goals* (MDGs). Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Pengarusutamaan Jender atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja Pelayanan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah : 1) **Urusan wajib** terdiri atas urusan ketahanan pangan dan 2) **Urusan pilihan** terdiri atas urusan pertanian. Kinerja Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan diarahkan

dan difokuskan pada pematapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN nomor 65/permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Dinas Ketahanan Pangan menyediakan empat jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Distribusi dan Cadangan Pangan;
3. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
4. Keamanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada tahun 2015 sampai 2019 memiliki tugas:

- 1) menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA);
- 2) terjaminnya sistem distribusi pangan yang baik. untuk menjamin stabilitas harga dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- 3) meningkatnya konsumsi pangan yang beragam. bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal; dan
- 4) meningkatkan jumlah dan ragam informasi inovasi teknologi pangan local lainnya yang disajikan berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja pelayanan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Table 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian thp Target (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan.	skor	85	85	85	85	85	82,4	83,3	64,1	79,8	85,0	96,9	98,0	75,4	93,8	100,0
2	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	skor	85	85	85	85	85	81,3	78,3	80,4	80,6	84,6	95,6	92,1	94,6	94,8	99,5
3	Tersedianya peta kerentanan dan kerawanan pangan	Dok	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-
4	Tertanganinya daerah rawan pangan	KK	175	175	175	175	175	200	168	195	220	175	114	96	103	111	-
5	Tersedianya Cadangan pangan pemerintah provinsi	Ton beras	10	10	10	10	10	4,4	4,4	2,9	2,9	8,7	44	44	29	29	76
7	Tersedianya informasi pasokan dan harga pangan di daerah	Dok	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	%	45	50	55	60	65	35,0	39,0	44,0	46,0	47,0	77,7	78	80	76,6	72,3
9	Tersedianya inovasi Pengembangan Pangan Lokal	Kelm pok	-	-	-	11	11	-	-	-	2	4	-	-	-	18,1	36,3
10	Terdiseminasinya paket informasi Pangan Lokal	Jenis	100	100	100	100	100	44	44	55	63	80	44	44	55	63	80



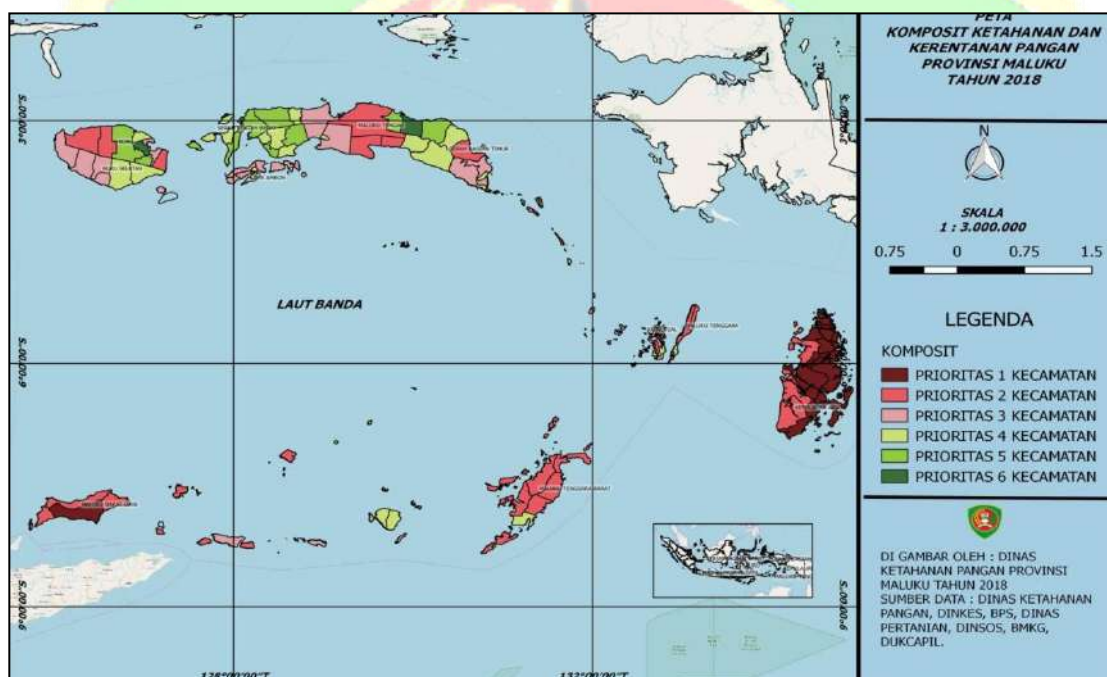
Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat yang tercermin dari skor PPH (Pola Pangan Harapan). Selama pelaksanaan Renstra 2015 – 2019, skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi belum mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk PPH ketersediaan pada tahun ketiga hanya mencapai skor 64,1. Hal ini disebabkan karena sejumlah kelompok bahan makanan ada yang belum mencapai skor yang diharapkan. Sedangkan untuk PPH Konsumsi pada tahun kedua mengalami penurunan skor ke 78,3. Hal ini disebabkan karena karena konsumsi masyarakat Maluku terhadap beberapa kelompok pangan yakni kelompok pangan kacang-kacangan, kelompok pangan sayur dan buah, dan pangan hewani masih sangat rendah. Meningkatnya harga beberapa bahan pangan termasuk beras yang memicu inflasi yang mana menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Faktor lainnya adalah besarnya pengeluaran belanja pangan dibandingkan non-pangan yang berindikasi rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan.

Selain itu, penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) di Maluku merupakan salah satu Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Tetapi Penanganan yang selama ini hanya berlaku untuk kondisi transien (Bencana. Konflik. tanggap darurat) dan untuk penanganan daerah rawan pangan kronis belum dilaksanakan. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) menunjukkan bahwa di Maluku terdapat 8 kecamatan dengan status Sangat Rentan terhadap rawan pangan (Prioritas 1), 35 kecamatan termasuk Agak Rentan (Prioritas 2), dan ada 34 kecamatan tergolong Rentan (Prioritas 3). Namun demikian, pada peta FSVA juga tampak beberapa daerah sudah termasuk kategori ketahanan pangan tinggi (Prioritas 5 dan 6) seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Diharapkan ke depan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada daerah-daerah rawan pangan yang masuk ketagori Prioritas 1 sampai 3.

Tabel 2.6 Skor FSVA Provinsi Maluku Tahun 2018.

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
360	Maluku Tenggara Barat	5.00	27.47	58.08	15.95	54.01	63.06	18.29	9.17	31.70	1
361	Maluku Tenggara	2.08	23.87	9.15	16.53	53.25	64.61	8.03	9.38	26.60	4
362	Maluku Tengah	1.24	21.20	41.44	1.59	50.88	66.06	10.15	9.46	32.00	4
363	Buru	0.68	17.40	27.15	5.51	47.68	66.03	13.93	8.66	31.80	5
364	Kepulauan Aru	5.00	27.13	34.62	42.03	53.89	62.34	15.46	8.39	34.20	1
365	Seram Bagian Barat	1.51	25.49	38.68	12.62	65.58	60.96	7.19	8.77	29.10	3
366	Seram Bagian Timur	2.09	23.59	50.45	16.03	62.95	58.56	6.33	7.87	41.10	3
367	Maluku Barat Daya	2.76	30.18	45.79	23.88	72.53	61.62	15.19	8.32	34.80	2
368	Buru Selatan	2.38	16.83	44.97	12.99	63.71	65.74	12.85	7.48	31.00	3



Gambar 2.4 Peta ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2018.

Indikator capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan lainnya yaitu Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar. Persentase tingkat mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan di tingkat pelaku usaha selama kurun waktu 2015 – 2018 menunjukkan tren kenaikan. Hal ini didasarkan pada hasil uji cepat dengan alat uji cepat deteksi dini (Rapid Test Kit) dan uji kualitatif di laboratorium. kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Sementara untuk pelaku usaha, selama periode 2015 – 2018 baru dikeluarkan sembilan sertifikat Prima-3. Di sisi lain, pelaku

usaha pangan segar asal tumbuhan masih banyak yang belum disertifikasi.

Tabel 2.7 Persentase Realisasi Anggaran Periode 2015 – 2019  
Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Belanja	2015	2016	2017	2018	2019*
1. Belanja Tidak Langsung	98.8%	98.8%	102.5%**	99,3%	77.5%
2. Belanja Langsung	83.7%	95.4%	93.3%	90.1%	53.1%
- Belanja Barang dan Jasa	80.6%	97.6%	96.2%	89.7%	59.9%
- Belanja Modal	88.0%	100%	93.4%	99.7%	100%
- Belanja Hibah	99.7%	79.8%	-	-	16.9%

\*Realisasi 31 Agustus 2019. \*\* sisa TKD tahun 2016 yang dibayarkan tahun 2017



Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2015 – 2019.

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata (Rp)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019*	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Belanja Tidak Langsung	5,100,472,402	5,359,507,890.04	5,359,507,890.04	5,293,062,976	4,672,021,469	5,040,922,740	5,366,676,212	5,749,809,137	5,255,682,344	3,621,369,493	98.8	98.8	102.5	99.3	77.5	5,206,965,660	4,992,837,185
2. Belanja Langsung	4,919,784,000	3,461,526,000	3,798,222,000	3,258,418,000	4,189,457,000	4,117,994,456	3,318,761,304	3,545,035,734	2,936,244,880	2,223,325,449	83.7	95.4	93.3	90.1	53.1	3,925,481,400	3,224,671,966
- Belanja Barang dan Jasa	3,551,854,000	2,997,430,000	3,209,022,000	3,051,734,000	3,515,617,000	2,862,254,715	2,463,207,554	3,088,339,734	2,765,462,630	2,105,325,449	80.6	97.6	96.2	89.7	59.9	3,181,715,000	2,661,174,816
- Belanja Modal	920,980,000	440,508,000	489,200,000	150,000,000	5,000,000	810,054,000	440,507,750	456,696,000	149,498,250	5,000,000	88.0	100	93.4	99.7	100	401,137,600	372,351,200
- Belanja Hibah	446,950,000	497,354,000	100,000,000	-	668,840,000	445,685,750	397,044,000	-	-	113,000,000	99.7	79.8	-	-	16.9	342,628,800	191,145,950
<b>TOTAL PAGU</b>	<b>10,020,256,402</b>	<b>8,821,033,890.04</b>	<b>9,407,985,561</b>	<b>8,551,480,976</b>	<b>8,861,478,469</b>	<b>9,158,917,205</b>	<b>8,667,435,516</b>	<b>9,585,889,597</b>	<b>8,191,929,224</b>	<b>5,045,810,803</b>	<b>91.4</b>	<b>97.5</b>	<b>94.5</b>	<b>95.8</b>	<b>66.0</b>	<b>9,132,447,060</b>	<b>8,217,509,152</b>

\*Realisasi 31 Agustus 2019.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**

Tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Maluku adalah bagaimana mencukupi kebutuhan pangan hingga ke tingkat individu dan rumah tangga dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini juga sangat berpengaruh pada ketahanan pangan suatu wilayah, sebab sektor pertanian merupakan Resource Based dalam penyediaan pangan bagi masyarakatnya. Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Maluku, yang perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Maluku adalah :

1. Kebijakan pengembangan pangan nasional yang lebih terfokus pada beras;
2. Upaya penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pangan karbohidrat lokal belum optimal;
3. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam :
  - Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras,
  - Masih rendahnya konsumsi pangan hewani (daging), kacang-kacangan serta sayur dan buah.
4. Kemampuan memproduksi pangan lokal masih rendah, terutama pada musim paceklik;
5. Penerapan teknologi produksi dan teknologi pengolahan pangan lokal di masyarakat belum mampu mengimbangi pangan olahan asal impor yang membanjiri pasar;
6. Kurangnya pelatihan bagi penyuluh/pendamping dalam menjalankan program pembinaan masyarakat tentang pangan;

7. Belum terlaksananya diversifikasi, produksi, dan konsumsi pangan dengan baik;
8. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya;
9. Terbatasnya tenaga/sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas;
10. Adanya kecenderungan masyarakat terhadap makanan cepat saji dari bahan impor;
11. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit mengubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil;
12. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Afinitas dalam pengembalian dana Bansos guna meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD);
13. Belum tersedianya data potensi daerah yang terintegrasi;
14. Sektor pertanian bukan merupakan program unggulan; dan
15. Biaya transportasi daerah kepulauan tergolong masih sangat tinggi.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Maluku adalah :

1. Tersedianya anggaran APBD maupun APBN yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan ketahanan pangan;
2. Adanya koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan MUI dalam melakukan berbagai upaya untuk standarisasi pangan yang sehat dan halal;
3. Tersedia pekarangan masyarakat yang cukup luas untuk produksi pangan lokal yang berkualitas yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Adanya harga pembelian pemerintah beras oleh Bulog, LDPM, dan Kelompok Lumbung Masyarakat;



5. Terbentuknya Kelompok Afinitas pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
6. Adanya kebijakan nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); dan
7. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib yang berpotensi mendukung pembentukan Badan Urusan Pangan Nasional yang dibawah langsung oleh presiden.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

Pemetaan permasalahan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2024 berdasarkan tupoksi di susun ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya angka Kerawan Pangan (Prioritas II FSVA Maluku 2018)	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Belum dimanfaatkannya Lahan Perkarangan sebagai sumber pangan sayur, buah, dan umbi-umbian.</li><li>b. Belum dimanfaatkannya potensi pangan lokal dalam menyediakan kecukupan dan sumber-sumber pangan bagi masyarakat</li><li>c. Belum difungsikannya cadangan pangan masyarakat berbasis kearifan lokal</li></ul>
2	Belum idealnya Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Maluku	Fokus kebijakan pembangunan pertanian masih berorientasi pada produksi dibandingkan pada kualitas gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Belum banyak regulasi daerah dibidang ketahanan pangan terkait kualitas gizi masyarakat</li></ul>
3	Stabilisasi harga dan pasokan masih mengalami fluktuasi	Inflasi pada beberapa pangan seperti bawang, dan cabe serta sayur- sayuran lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Rendahnya produktivitas cabe, bawang dan sayur-sayur lainnya</li><li>b. Belum difungsikannya lahan pekarangan secara optimal</li></ul>

4	Masih banyak pangan segar asal tumbuha yang belum terjamin mutu dan keamanannya yang beredar di masyarakat	Tingginya penggunaan pestisida kimia ditingkat produsen / petani  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang bermutu dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya persepsi petani terkait penggunaan pestisida kimia sesuai anjuran</li> <li>b. Belum adanya regulasi Pemerintah Daerah terkait mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan</li> <li>c. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi tentang mutu dan kewan pangan segar</li> </ul>
---	--	--	--

Berdasarkan dari aspek kajian terbagi atas ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi harga pangan, konsumsi dan keamanan pangan. Dimana dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi, seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Dari kondisi saat ini, Ketersediaan pangan untuk energi dan protein selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sedangkan untuk distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan mahalnya harga pangan dan Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dengan koefisien variasi < 10%. Untuk kualitas konsumsi, konsumsi masyarakat Maluku masih rendah, dimana capaian skor PPH 84.6 yang masih jauh dari skor PPH ideal.

Guna mengidentifikasi permasalahan dalam pemenuhan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, capaian skor PPH, tingkat konsumsi serta keamanan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM), pendataan data BPS, operasi pasar, dan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).



Faktor internal yang berpengaruh adalah tersedianya alokasi dana untuk peningkatan produksi pangan lokal, pemetaan daerah rawan pangan, sistem/rantai pasar pangan yang belum efektif, terbatasnya pengumpulan data informasi pasar, belum optimalnya diversifikasi pangan, lemahnya promosi dan pelatihan olahan produk pangan lokal, dan terbatasnya produksi pangan lokal.

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh adalah kebutuhan pangan terus meningkat, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, anomali iklim, bencana alam dan menurunnya kualitas lingkungan. Selanjutnya rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pangsa pengeluaran untuk produk pangan, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil.

Faktor eksternal iainnya adalah berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan, fluktuasi harga, terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang aman dan halal, budaya masyarakat belum makan bila tidak makan nasi serta regulasi penggunaan produk pangan lokal untuk pangan olahan.

Untuk permasalahan pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan yaitu untuk memenuhi ketersediaan energi 2.400 kkal dan protein 57 gr/kapita/hari masih bergantung pada bahan pangan pokok beras dan pangan impor/luar daerah, masih lemahnya koordinasi lintas sektor stake holder terkait, belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Selain itu rendahnya kemampuan/daya beli masyarakat dalam mengakses pangan, harga pangan masih fluktuatif, dan penganeekaragaman pangan masyarakat belum optimal.

Tabel 3.2. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.

Aspek kajian	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan OPD
			internal	eksternal	
Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Energi dan protein pada tahun 2020 sebesar 58% dari AKE atau setara dengan 1.392 kkal/kap/hari. Adapun ketersediaan protein sebesar 57 gr/kap/hari.	NBM	Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal	Kebutuhan pangan terus meningkat Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan Anomali iklim dan menurunnya kualitas Pangan	Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.400 kkal/kap/hari dan protein 57gr/kapita/hari masih tergantung pada pangan impor/luar daerah Lemahnya koordinasi lintas sektor
Distribusi/ Keterjangkauan Pangan	Distibusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan		Sistem pasar pangan yang belum efektif	Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil -Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan	Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan Lemahnya koordinasi lintas sektor
Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH 84,5 poin.	BPS (Susenas)	Terbatasnya diversifikasi pangan Terbatasnya produksi pangan lokal	Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang, aman, sehat (B2SA) dan halal Budaya masyarakat "belum makan bila tidak makan nasi"	penganekaragam pangan belum optimal

### **3.2. Telaahan Visi, Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2019 – 2024**

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Maluku pada saat ini, dan D) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka untuk Lima Tahun kedepan telah disusun Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai berikut:

#### **“MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUS KEPULAUAN”**

Visi 2019 – 2024 mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu :

##### **1. MALUKU YANG JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI**

Seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintah di Maluku.

##### **2. MALUKU YANG TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN**

Dalam penyelenggaraan pemerintah, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku

##### **3. MALUKU YANG BERDAULAT ATAS GUGUS KEPULAUAN**

Pengelolaan sumberdaya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku



Tabel 3.3. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur.

No.	Visi/Misi/Program Kerja	Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	“Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan”/ Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”.	Meningkatnya pelayanan publik yang bersih kepada para pihak	Masih rendahnya pelayanan publik kepada para pihak	- Masih rendahnya SDM - Adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada para pihak
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan.	Meningkatkan produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Adanya program peningkatan produksi pangan
		Menurunkan presentase penduduk rawan pangan	Masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	Adanya basis data terpadu kemiskinan dari Data Statistik
		Stabilisasi harga bahan pangan	Harga bahan pangan masih berfluktuatif	Adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
		Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
		Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya local	Masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya local	Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
		Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Pelatihan yang terintegrasi

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku**

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan antara lain adalah : 1) harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; 2) tingginya presentase penduduk miskin yang dengan kemampuan daya beli yang masih rendah; 3) rendahnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Dan faktor pendorong adalah : 1) sudah adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan; 2) adanya program dalam pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan; dan 3) tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dengan dengan sasaran strategis jangka menengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam,
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan,
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen,
4. Meningkatnya keragaman konsumsi yang sehat dan aman
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka target kinerja program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2015-2019 antara lain :

1. Tersedianya pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;

2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) di atas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan *Coefficient of Varians* maksimum 5%;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;
6. Meningkatnya konsumsi energi dan protein masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) untuk hidup sehat, aktif dan produktif;

Tercapainya keamanan pangan segar dengan jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi sebanyak 400 orang pada tahun 2019



Table 3.4. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

NO	Sasaran Renstra K/L	Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	Permasalahan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang beragam	Meningkatkan produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	Adanya program peningkatan produksi pangan
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Menurunkan presentase penduduk rawan pangan	Masih tingginya presentase penduduk rawan pangan	Belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	Adanya basis data terpadu kemiskinan dari Data Statistik
3	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Stabilisasi harga bahan pangan	Harga bahan pangan masih berfluktuatif	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal
5	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
6	Tercapainya keamanan pangan	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

Berdasarkan hasil telaah terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dalam mencapai sasaran Renstra jangka menengah K/L yaitu:

1. Masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal
2. Masih tingginya presentase penduduk rawan pangan
3. Harga bahan pangan masih berfluktuatif
4. Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman
5. Masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan b2sa berbasis sumber daya lokal
6. Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius.

Terkait dengan permasalahan tersebut, faktor-faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI adalah : 1) Lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan; 2) Belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan; 3) Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; 4) Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal; 5) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan; 6) Kinerja petugas belum optimal dan faktor penghambat adalah : 1) Adanya program peningkatan produksi pangan; 2) Adanya basis data terpadu kemiskinan dari Data Statistik; 3) Adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan; 4) Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal; 5) Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat; dan 6) Pelatihan yang terintegrasi.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan konversi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang	Meningkatkan produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal	Lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan	Adanya program peningkatan produksi Pangan
2	Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan bencana alam dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi rawan pangan	Menurunkan presentase penduduk rawan pangan	Belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	Adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K
3	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan	Stabilisasi harga bahan pangan	Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan
4	Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan penduduk	Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal	Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal



5	Keterbatasan infrastruktur wilayah	Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat
			Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : 1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang; 2) Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam; 3) Belum optimalnya kawasan strategis; 4) Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang; dan 5) Keterbatasan infrastruktur wilayah.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang secara tidak langsung akan berpengaruh pada rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal. Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi pangan.

Implikasi RTRW tentang kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah rawan bencana alam, memberikan ancaman terkait belum optimalnya kawasan strategis dan keterbatasan infrastruktur wilayah yang secara tidak langsung juga berhubungan

dengan permasalahan pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan yaitu : harga bahan pangan masih berfluktuatif, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategi pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Maluku, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L Kementerian;
3. Sasaran, Permasalahan jangka Menengah dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan ;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHAS bagi pelayanan OPD.

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gejolak Perekonomian Global	Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditas, situasi pangan nasional	Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup, perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan	Lingkungan Hidup
3	Sustainable Development Goals (SDG's)	Kemiskinan dan Gender	Kemiskinan
4	Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan	Kerjasama antar provinsi	Kerjasama antar daerah

Dari hasil identifikasi isu-isu strategis dari lingkungan eksternal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, dilakukan metode pembobotan dengan hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Pangan Berkelanjutan dengan menggunakan 5 Dimensi, 11 Variabel dan 34 Indikator dengan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.7. Indeks Ketahanan Pangan Berkelanjutan Provinsi Maluku Tahun 2018

Dimensi KPB	INDEKS KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN (KPB)											
	Ambon	Tual	Malteng	Malra	SBB	SBT	Buru	Bursel	Aru	MTB	MBD	MALUKU
Ketersediaan	0,30	0,32	0,79	0,62	0,83	1,57	1,32	0,89	1,01	0,88	0,72	0,84
Aksesibilitas	0,82	0,55	0,55	0,65	1,31	0,60	0,49	0,61	0,96	0,79	0,65	0,73
Pemanfaatan	0,66	0,65	0,53	0,50	0,55	0,47	0,56	0,54	0,48	0,49	0,50	0,54
Kemandirian	0,05	0,01	0,48	0,40	0,63	0,61	1,36	0,32	0,11	0,42	0,73	0,47
Keberlanjutan	0,21	0,29	0,68	1,10	0,54	0,29	1,19	0,33	0,25	0,31	0,51	0,52
Indeks KPB	2,05	1,82	3,04	3,26	3,87	3,53	4,92	2,68	2,81	2,90	3,11	3,09
Kategori KPB	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Agak Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>

Secara umum, Maluku berada pada kondisi ketahanan pangan berkelanjutan kategori Sedang artinya capaian kinerja Dinas selama ini cukup baik. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan (2019 – 2023) kelima Dimensi Ketahanan Pangan Berkelanjutan ini akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku**

##### **A. Tujuan**

1. Terwujudnya ketersediaan pangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat.
2. Tercapainya stabilitasi posokan dan harga pangan pokok dan penguatan cadangan pangan daerah.
3. Meningkatnya diversifikasi, penganekaragaman dan inovasi teknologi olahan pangan dari pangan lokal.
4. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.

##### **B. Sasaran**

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat dengan indikatornya adalah diversifikasi pangan di daerah rawan pangan berdasarkan Gugus Pulau.
2. Penyediaan pangan dengan harga terjangkau dengan indikatornya adalah terjaganya stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani minimal sama dengan harga pembelian pemerintah, dan terjaganya stabilitas harga komoditas pangan lokal yang terjangkau oleh masyarakat, serta penguatan cadangan pangan Pemerintah.
3. Peningkatan penganekaragaman aneka olahan dengan inovasi teknologi pangan olahan lokal berdasarkan gugus pulau sesuai komoditas lokal, serta mengurangi konsumsi pangan beras.
4. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal dengan indikatornya adalah tersedianya sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang

dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan di setiap Gugus Pulau.





Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Ketersediaan pangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan suberdaya lokal dan akses pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat dengan indikatornya adalah Diversifikasi pangan di daerah rawan pangan berdasarkan Gugus Pulau	PPH Konsumsi (%)	79,8	85,0*	85	85	85	85	85	
		Penanganan Daerah Rawan Pangan (KK)	220	175*	275	300	325	350	400	
		Stabilitas Harga (Dokumen)	11	11*	11	11	11	11	11	

Tercapainya Stabilitas posaokan dan harga pangan pokok dan penguatan cadangan pangan daerah	Penyediaan pangan dengan harga terjangkau dengan indikatornya adalah terjaganya stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani minimal sama dengan harga pembelian pemerintah, dan terjaganya stabilitas harga komoditas pangan lokal yang terjangkau oleh masyarakat dan penguatan cadangan pangan pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan (ton)	2.9	8,7	15	20	25	30	35	
		Peta FSVA (Dok)	1	-	1	-	1	-	1	
Meningkatnya Diversifikasi dan penganekecaragaman pangan local dan inovasi teknologi pangan olahan local	Peningkatan penganekecaragaman aneka olahan dengan inovasi teknologi pangan olahan local berdasarkan gugus pulau sesuai komoditas lokal serta mengurangi konsumsi pangan beras.	PPH Konsumsi (%)	80.6	84.6*	86.5	87	87.5	88	89	
		Penganekecaragaman / Desiminasi Pangan Olahan (Jenis)	63	80*	45	50	55	65	85	
		Inovasi Pangan Lokal (Kelompok)	2	4*	4	5	7	8	10	

Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dengan indikatornya adalah tersedianya sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan disetiap Gugus PulauKe	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	46.0	47.0*	55	65	75	85	95	
		Kelembagaan OKKPD (%)	30	40*	50	60	70	80	90	

Keterangan : \* (dalam proses realisasi)



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku**

Untuk mewujudkan visi dan misi, Gubernur Maluku beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan.

1. *Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.*

**Strategi :**

- memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan.
- melakukan analisis dan program aksi penanganan wilayah rawan pangan.

**Kebijakan :**

- Pengembangan kajian responsive dan antisipatif ketersediaan pangan.
- Pembinaan dan Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan.
- Deteksi dini terhadap wilayah rawan pangan.
- Intervensi wilayah rawan pangan.

2. *Tercapainya Distribusi dan Cadangan Pangan.*

**Strategi :**

- Penguatan sistem kelembagaan pangan.
- Melakukan stabilisasi harga pangan pokok.

**Kebijakan :**

- Penguatan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat.
- Penguatan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah.
- Pengembangan usaha pangan masyarakat/Toko Tani Indonesia Maluku Center.
- Pemantauan panel harga dan pasokan serta jaringan distribusi pangan.
- Intervensi Subsidi pangan pokok.
- Peningkatan peran Satgas Pangan Terpadu.

3. *Peningkatan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.*

**Strategi :**

- Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, seimbang dan aman.
- Penurunan angka konsumsi makan beras.
- Diversifikasi dan inovasi pangan olahan.
- Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.

**Kebijakan**

- Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal
- Pengembangan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.
- Peningkatan jumlah informasi inovasi teknologi melalui media cetak dan elektronik.

#### 4. Peningkatan Keamanan Pangan.

##### Strategi :

- Memantapkan pengawasan keamanan pangan segar.

##### Kebijakan :

- Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.
- Penyediaan fasilitas laboratorium keamanan pangan segar.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat dengan indikatornya adalah Diversifikasi pangan di daerah rawan pangan berdasarkan Gugus Pulau	- Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan.	Pengembangan kajian responsive dan antisipatif ketersediaan pangan
		- Melakukan analisis dan program aksi penanganan wilayah rawan pangan	Pembinaan dan Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan
			Deteksi dini terhadap wilayah rawan pangan
			Intervensi wilayah rawan pangan
Tercapainya Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyediaan pangan dengan harga terjangkau dengan indikatornya adalah terjaganya stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani minimal sama dengan harga pembelian pemerintah, dan terjaganya stabilitas harga komoditas pangan lokal yang terjangkau oleh masyarakat dan penguatan cadangan pangan pemerintah	- Penguatan sistem kelembagaan pangan	Penguatan dan Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat
		- Melakukan stabilisasi harga pangan pokok	Penguatan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
			Pengembangan usaha pangan masyarakat/ TokoTani Indonesia Maluku Center
			Pemantauan panel harga dan pasokan serta jaringan distribusi pangan
		Intervensi Subsidi pangan pokok	
			Peningkatan peran Satgas Pangan Terpadu



<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Peningkatan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Peningkatan penganekaragaman aneka olahan dengan inovasi teknologi pangan olahan lokal berdasarkan gugus pulau sesuai komoditas lokal serta mengurangi konsumsi pangan beras.	-	Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal	Peningkatan penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal
		-	Penurunan angka konsumsi makan beras	Pengembangan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
		-	Diversifikasi dan inovasi panganolahan	Peningkatan jumlah informasi inovasi teknologi melalui media cetak dan elektronik
Peningkatan Keamanan Pangan	Peningkatan keamanan pangan dengan indicator pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan promosi keamanan pangan disetiap gugus pulau serta penguatan kelembagaan OKKPD di setiap kabupaten.		Memantapkan pengawasan keamanan pangan segar	Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar
				Penyediaan fasilitas laboratorium keamanan pangan segar

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana.

Untuk Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang dimaksud adalah sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatannya sebagai berikut :

1. Lumbung Pangan;
2. Toko Tani Indonesia Central Maluku (TTICM);
3. Pemantauan Data Harga dan Pasokan Pangan;
4. Cadangan Pangan Pemerintah;
5. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan;
6. Bazar pangan murah untuk Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
8. Peningkatan Koordinasi Ketahanan Pangan;
9. Ekspos Hari Pangan Sedunia;
10. Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan;
11. Inventarisasi Aset Ketahanan Pangan;
12. Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan;
13. Promosi Produk Pangan pada Peringatan PENAS
14. Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan;
15. Pengembangan Pulau Mandiri Pangan;
16. Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat;
17. Penanganan Daerah Rawan Pangan;
18. Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan (FSVA);
19. Analisa Ketersediaan Pangan;
20. Sistem Pemetaan dan Inventarisasi Sumber Daya Pangan;
21. Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG);
22. Pengembangan Industri Pangan Lokal;
23. Pengembangan Kreativitas Pengolahan Pangan Lokal;



24. Peningkatan Produksi Pangan;
  25. Pengembangan Cluster Pangan Lokal;
  26. Analisis Konsumsi Pangan Penduduk;
  27. Sosialisasi dan Pembinaan B2SA;
  28. Festival Pangan Lokal B2SA;
  29. Pengembangan dan Pembinaan KRPL untuk Pengetasan Stanting
  30. Operasional Obor Pangan Lestari;
  31. Gerakan Sehari Tanpa Nasi (*One Day No Rice*);
  32. Gelar Pangan Lokal Nusantara;
  33. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar;
  34. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan (OKKPD);
  35. Peningkatan Kompetensi Petugas/SDM Keamanan Pangan Melalui *Inhouse Treaning*;
  36. Akselerasi OKKPD Maluku;
  37. Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar;
  38. Kerjasama Antar Lembaga /Instansi Pengawasan Keamanan Pangan Tingkat Provinsi.
  39. Pengembangan Koorporasi Usaha Tani
- II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya terdiri dari :
- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - d. Penyediaan alat tulis kantor;
  - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- f. Penyediaan makan dan minum;
  - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  - h. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis Perkantoran;
  - i. BPJS Kesehatan untuk Tenaga Honorer
- III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatannya terdiri dari :
- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - d. Membangun system informasi ketahanan pangan;
  - e. Pengadaan Meubeleir Gedung Kantor
  - f. Pengadaan Kendaraan Roda 2
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatannya terdiri dari :
- a. Pendidikan dan pelatihan formal;
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatannya terdiri dari :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  - c. Penyusunan laporan tahunan perangkat daerah;
  - d. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
  - e. Penatausahaan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatannya terdiri dari :

- a. Penyusunan e-Proposal Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Forum Koordinasi OPD.

Tebel. 6.1 Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2024

<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>
Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	Analisis Ketersediaan Pangan
		2	Pembinaan kawasan mandiri pangan
		3	Pulau mandiri pangan
		4	Akses pangan masyarakat
		5	Penanganan Daerah Rawan Pangan
		6	Peta Daerah Rawan Pangan (FSVA)
		7	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Pangan
		8	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
		9	Bazar pangan murah untuk hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN)
		10	Korporasi usaha tani
Distribusi dan Cadangan Pangan		1	Lumbung pangan
		2	Toko Tani Indonesia Central Maluku (TTICM)
		3	Pemantauan data harga dan pasokan pangan
		4	Cadangan Pangan Pemerintah
		5	Analisis harga dan pasokan harga
		6	Stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok



Program	Indikator Program	No	Nama Kegiatan
	Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	1	Pengembangan usaha dan industry pangan lokal
		2	Pengembangan kreativitas pengolahan pangan lokal
		3	Peningkatan produksi pangan
		4	Pengembangan cluster pangan lokal
		5	Analisis konsumsi pangan penduduk
		6	Sosialisasi dan pembinaan B2SA
		7	Festival pangan lokal B2SA
		8	Gerakan optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga
		9	Operasi obor pangan lestari
		10	Gerakan Masyarakat Untuk Mengonsumsi Pangan Lokal ( <i>one day no rice</i> )
		11	Pengembangan dan Pembinaan KRPL untuk Pengetasan Stanting
	Keamanan Pangan	1	Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar
		2	Penguatan kelembagaan keamanan pangan (OKKPD)
		3	Peningkatan kompetensi petugas/SDM keamanan pangan melalui <i>Inhouse Treaning</i>
		4	Akselerasi OKKPD Maluku
		5	Sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar
		6	Kerjasama antarlembaga/instansi pengawasan keamanan pangan Tingkat Provinsi (jejaring keamanan pangan daerah)
		7	Peningkatan Kapasitas Informasi Kerjasama dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah

Program	Indikator Program	No	Nama Kegiatan
	Sekretariat	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		2	Peningkatan Koordinasi Ketahanan Pangan
		3	Ekspos Hari Pangan Sedunia
		4	Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
		5	Inventarisasi aset Ketahanan Pangan
		6	Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan
		7	Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan
Perencanaan Pembangunan Daerah		8	Forum Perangkat Daerah
		9	Penyusunan e-Proposal Bidang Ketahanan Pangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10	Penatausahaan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
		11	Penyusunan Laporan Tahunan DKP
		12	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Program dan ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD dan Laporan Tahunan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		13	Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program	Indikator Program	No Nama Kegiatan	
		15	Pengadaan Meubeleir Gedung Kantor
		16	Pemeliharaan Sistem Informasi Dinas Ketahanan Pangan
		17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
		18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pelayanan Administrasi Kantor		19	BPJS Kesehatan untuk Tenaga Honorer
		20	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
		21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		22	Penyediaan Makanan dan Minuman
		23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		24	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		26	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
		27	Penyediaan jasa surat menyurat

## 6.2 Pendaan Indikatif

Pagu indikatif untuk pembiayaan rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 2019 – 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tampak pada tabel berikut disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.



Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif  
Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Kondisi Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD (2024)	OPD Penanggung jawab
								2019		2020		2021		2022		2023			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
<b>Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</b>																			
Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap komoditi pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan																
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Lumbung Pangan	Tersedianya dan terkelolanya Lumbung Pangan Masyarakat	Lumbung			-	-	3	100.000	3	105.000	3	110.250	3	115.763	3	DINAS KETAHANAN PANGAN

			Toko Tani Indonesia Centra Maluku (TTICM)	Terjangkaunya daya beli masyarakat terhadap pangan dengan harga yang stabil	Unit				-	-	4	250.000	4	262.500	4	275.625	4	289.406	4,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pemantauan Data Harga dan Pasokan Pangan	Terpantaunya panel barga dan pasokan pangan di II kab kota secara teratur dan berkelanjutan	Data harga				-	-	11	100.000	11	105.000	11	110.250	11	115.763	11	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya alokasi cadangan pangan pemerintah provinsi .PP No. 17 Tahun 2015 dan Pergub Maluku No. 28 Tahun 2018	Ton				11	200.000	11	210.000	11	220.500	15	231.525	15	243.101	15	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Terpantaunya panel barga dan pasokan pangan di II kab kota secara teratur dan berkelanjutan	Dokumen Analisis				12	50.000	12	52.500	12	55.125	12	57.881	12	60.775	12	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN





		Pangan																	PANGAN
			dan Data Aset Ketahanan Pangan																DINAS KETAHANAN PANGAN

		Penyusunan buku statistik Ketahanan Pangan	tersedia data statistik Ketahanan Pangan	Buku				10	150.000	10	157.500	10	165.375	10,00	173.644	10		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan	Keikutsertaan pada Kegiatan PENAS Tahun 2020, 2022, 2024	Nasional				1	200.000	-	-	1	210.000	-	-	1		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Terbinanya Kawasankawasaan mandiri pangan di Provinsi Maluku	Lokasi				2	200.000	7	210.000	7	220.500	7	231.525	7		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Peningkatan Pulau Mandiri Pangan	Terciptanya Pulau-pulau mandiri pangan di Provinsi Maluku	Wilayah				1	175.000	1	183.750	1	192.938	1	202.584	1		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Tersedianya Kartu Akses Pangan Masy.	Orang				25	150.000	25	157.500	25	165.375	30	173.644	30		DINAS KETAHANAN PANGAN

			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya keluarga prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar secara minimal (Permendagri 86 Tahun 2017)	Kegiatan		1	130.000	1	200.000	1	262.500	1	275.625	1	289.406	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan (FSVA)	Pelatihan petugas analisa FSVA dan tersedianya data analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat kec dan desa	Dokumen Peta		1	70.000	1	150.000	1	157.500	1	165.375	1	173.644	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Analisis Ketersediaan Pangan	Terlaksananya pelatihan bagi petugas NBM	Buku Analisis		30	50.000	30	100.000	30	110.250	30	115.763	30	121.550	30	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Inventarisasi Potensi Sumberdaya Pangan	Tersedianya buku yang berisi Potensi Sumberdaya Pangan	Buku				20	75.000	20	78.750	15	82.688	15,00	86.822	15	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya data analisis yang dapat digunakan dalam penanganan daerah rawan pangan	Orang		1	81.500	35	100.000	20	131.250	20	137.813	20	144.703	20	DINAS KETAHANAN PANGAN

			Pengembangan Usaha dan Industri Pangan Lokal	Berkembang dan Meningkatnya usaha produksi industri pangan	Unit		2	680.000	2	714.000	3	749.700	4	787.185	4	826.544	4	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan Kreativitas Pengolahan Pangan Lokal	Terciptanya usaha olahan pangan lokal berbahan baku pangan lokal	Kelompok		-	-	2	300.000	4	315.000	5	330.750	6	347.288	7	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Peningkatan Produksi Pangan	Produksi bahan baku pangan lokal daerah	Ha		-	-	5	400.000	5	420.000	5	441.000	5	463.050	5	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan Cluster Pangan Lokal	Terciptanya cluster pangan lokal	Cluster		-	-	3	500.000	3	525.000	3	551.250	3	578.813	4	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Analisis Konsumsi Pangan Penduduk	Dapat diukur tingkat kecukupan gizi dan skor PPH suatu wilayah	Dokumen analisis		-	-	2	30.000	2	31.500	2	33.075	2	34.729	2	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Sosialisasi dan Pembinaan BZSA	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan BZSA di II Kabupaten/kota	OP		-	-	28	190.000	31	199.500	34	209.475	37	219.949	40	DINAS KETAHANAN PANGAN

			Festival Pangan Lokal Menu BZSA	Mendorong penerapan konsumsi BZSA dan mendorong kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan pangan lokal yang bernilai komersial	Buku Resep		500	350.000	500	350.000	500	351.000	500	330.000	500	347.288	500	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Gerakan Optimalisasi Lahan Pekarangan Rumah Tangga	Meningkatnya aksesibilitas sumberdaya pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan	Orang				11	75.000	15	185.850	20	195.143	25	204.900	30	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Operasional Obor Pangan Lestari (OPAL)	terpeliharannya lahan pekarangan yg berada pada Dinas Ketapang	Operasional				11	30.000	11	31.500	11	33.075	11	34.729	11	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Gerakan Masyarakat Untuk Mengonsumsi Pangan Lokal ( <i>one day no rice</i> )	Peningkatan pengankearagan konsumsi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber karbohidrat yang berasal dari beras	Dokumen		11,00	30.000	11,00	60.000	11,00	120.000	11,00	240.000	11,00	480.000	11,00	DINAS KETAHANAN PANGAN



			Gelar Pangan Lokal Nusantara	Pengembangan dan promosi aneka pangan lokal Maluku secara global guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pangan lokal	Kegiatan		1	60.000	1	150.000	1	157.500	1	165.375	1	173.644	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar yang efektif	Kegiatan	11	50.000	1	100.000	15	105.000	17	110.250	19	115.763	21		DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan (DKKPD)	Meningkatnya kelembagaan keamanan pangan segar	Kegiatan			1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763	1		DINAS KETAHANAN PANGAN
			Peningkatan Kompetensi Petugas/SDM Keamanan Pangan Melalui INHOUSE TRAINING	Meningkatnya pengetahuan petugas dalam penanganan keamanan pangan dengan BKP Pusat	Orang			5	75.000	10	78.750	10	82.688	10	86.822	10		DINAS KETAHANAN PANGAN



			Pemberian penghargaan adikarya pangan nusantara	Terpilihnya calon penerima penghargaan adikarya pangan nusantara tingkat Promal	Orang					5	100.000	10	105.000	15	110.250	20	115.763	25	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Sistem Pemetaan dan Inventarisasi Sumber Daya Pangan	Terlaksananya inventarisasi potensi sumber daya pangan lokal di kabupaten kota	Dokumen					1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan pangan untuk keluarga miskin (Pankin)	Tersedianya pangan murah untuk masyarakat berbasis sumberdaya lokal	Jenis					5	100.000	10	105.000	15	110.250	20	115.763	25	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal Maluku (MP3L)	Terciptanya olahan pangan lokal berbaan baku sagu,jagung,da n umbi-umbian di Kab. Aru (1 Kel) Kab MTB (1 Kel) Malteng (2 kel)	Kelompok					4	400.000	8,00	420.000	10,00	441.000	12	463.005	14	DINAS KETAHANAN PANGAN

			Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan supply pangan	Tersusunnya pola konsumsi pangan penduduk provinsi Maluku	Dokumen					1	150.000	1	157.500	1	165.375	1	173.644	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pengembangan cadangan pangan masyarakat	Gapoktan					5	100.000	10	105.000	15	110.250	20	115.763	25	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan koorporasi Usaha Tani	Terlaksananya pengembangan koorporasi usaha tani di 2 kabupaten	Kelompok					2	60.000	4	63.000	6	66.150	8	69.458	10	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pameran / Ekspo PSAT	Tersedia produk PSAT	Dokumen					1	75.000	1	78.750	1	82.688	1	86.822	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Workshop pengolahan sagu di Promal	Terlaksananya workshop pengolahan sagu	Orang					50	250.000	50	262.250	75	275.625	75	289.406	80	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Bimbingan teknis pengembangan system informasi keamanan pangan	Meningkatkan pengetahuan petugas terhadap system informasi keamanan pangan	Orang					25	75.000	30	78.750	35	82.688	40	86.822	45	DINAS KETAHANAN PANGAN



			Penguatan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) Ketahanan Pangan	Tersedianya pengelolaan keuangan lingkup Dinas Ketahanan Pangan	Dokumen				1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengembangan dan Pembinaan KRPL untuk Pengetasan Stanting	Terbangunnya Ketahanan Pangan Ditingkat Rumah Tangga	Kegiatan				11	175.000	11	183.750	11	192.938	11	202.584	11	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>															DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan jasa surat menyurat		Bln		12	2.750	12	2.888	12	3.032	12	3.183	12	3.343	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bln		12	80.000	12	150.000	12	157.500	12	165.375	12	173.644	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan jasa kebersihan kantor		Bln		12	100.000	12	105.000	12	110.250	12	115.763	12	121.551	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan alat tulis kantor		Bln		12	26.000	12	27.300	12	28.665	12	30.098	12	31.603	12	DINAS KETAHANAN PANGAN

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bln			12	20.000	12	20.000	12	22.000	12	23.000	12	24.000	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan makan dan minum		Bln			12	20.000	12	30.000	12	31.500	12	33.075	12	34.729	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		OP			13	190.700	17	265.073	20	368.451	25	512.148	30	711.885	35	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran		Orang			17	396.000	17	475.200	17	570.240	17	684.288	17	821.146	17	DINAS KETAHANAN PANGAN
			BPJS Kesehatan untuk Tenaga Honorer		Orang					20	20.000	20	21.000	25	22.050	25	23.153	30	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Bulan			12	30.000	12	30.000	12	35.000	12	40.000	12	45.000	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengadaan Meubelir gedung kantor		Unit			1	5.000	5	250.000	10	262.500	15	275.625	20	289.406	25	DINAS KETAHANAN PANGAN

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Unit		4	50.000	4	75.000	10	112.500	15	168.750	20	253.125	25	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pemeliharaan Sistem Informasi Dinas Ketahanan Pangan		Bulan		12,00	170,00	12,00	178,50	12,00	187,00	12,00	195,50	12,00	204,00	12,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 2	Unit				1	25.000	3	26.250	4	27.563	5	28.941	6	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>															DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pendidikan dan pelatihan formal		Orang		8	81.400	8	97.000	9	101.850	9	106.943	10	112.290	10	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>															DINAS KETAHANAN PANGAN

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Program dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD		Laporan			5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyusunan Laporan Tahunan DKP		Laporan			5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penatausahaan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan		Kegiatan			-	-	1	125.000	1	131.250	1	137.813	1	144.703	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
			<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Daerah</b>																DINAS KETAHANAN PANGAN
			Forum Koordinasi OPD	Tersedianya program dan kegiatan ketahanan pangan	Orang			50	122.000	50	140.300	50	161.345	50	185.547	50	213.379	50	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Penyusunan e-proposal bidang Ketahanan Pangan	Tersedianya Proposal Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan	SDM			30	66.700	30	76.705	30	88.211	30	101.442	30	116.659	30	DINAS KETAHANAN PANGAN



Jumlah	3.568.595	10.503.564	10.915.235	12.047.833	13.056.197		
--------	-----------	------------	------------	------------	------------	--	--



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU**

#### **7.1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku (DKP-Promal) diukur dengan 10 indikator dan dibandingkan kemajuannya dalam dua kurun waktu, yakni tahun 2018 dan 2019 serta rencana target capaian lima tahun setelahnya, yakni antara tahun 2020 dan 2024. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Stabilitas harga. Stabilitas harga pangan dan sayur-sayuran mempunyai makna penting, khususnya di provinsi Maluku, sebab jenis pangan seperti beras dan sayur-sayuran tertentu seperti bawang merah dan cabe rawit, turut mempengaruhi inflasi yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan.
2. Penguatan cadangan pangan. Cadangan pangan di pedesaan wilayah kepulauan seperti Maluku umumnya ditemukan di lahan petani, kecuali pada wilayah tertentu yang memiliki iklim ekstrim seperti pulau Kisar dimana cadangan pangan (jagung) disediakan di dalam rumah. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang tidak menentu dan menghindarkan anggota rumah tangga dari kelaparan. Cadangan pangan ini disediakan dalam bentuk stok pangan yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pembuatan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Peta ini dibuat oleh *World Food Programme* (WFP) bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan yang telah dimulai sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2012 datanya telah menjangkau sampai ke tingkat desa. Pada

tahun 2018 telah disusun FSVA di 335 kabupaten (85%) berada dalam status tahan pangan, dan 91 kota (93%) berada dalam status tahan pangan. Penyediaan informasi ini didasarkan kepada UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemda membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem informasi Pangan dan Gizi terintegrasi. Peta ini menjelaskan kondisi ketersediaan, akses dan manfaat/konsumsi pangan baik dalam kondisi rawan maupun tidak. Ada 13 indikator yang digunakan dimana 9 indikator termasuk indikator kerawanan pangan kronis dan 4 indikator kerawanan pangan sementara/ transien. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BKP Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta BPS, Departemen Kesehatan, Departemen Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selama 5 (lima) tahun terakhir. Peta dibuat dalam bentuk warna dimana warna merah menggambarkan kerawanan pangan sedangkan hijau memberikan indikasi lebih baik (warna yang semakin tua menggambarkan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ketahanan dan atau kerawanan pangan)

4. Penanganan daerah rawan pangan. Oleh karena Maluku merupakan wilayah berciri kepulauan dimana aksesibilitas dan konektivitas antar pulau memerlukan waktu yang cukup lama karena keterbatasan transportasi dan komunikasi, maka pemerintah menyiapkan pangan dan transportasi untuk penanganan rawan pangan dalam bentuk distribusi pangan dalam waktu yang lebih cepat ke daerah rawan pangan.
5. Pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan. PPH ketersediaan merupakan gambaran ketersediaan pangan yang beragam pada sisi produsen (supply side) sehingga jika salah satu pangan terjadi kekurangan (deficit) maka dapat ditutupi oleh jenis pangan lainnya. Dalam hal ini jenis pangan yang disediakan tidak hanya beras yang sebagai komoditas pangan pokok nasional, tetapi juga jagung, kedelai, termasuk pangan lokal berupa padi ladang, jagung lokal,



umbi-umbian dan sagu. Hal ini seharusnya menjadi cadangan pangan Maluku sehingga tidak tergantung dari beras nasional.

6. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pola Pangan harapan disisi konsumsi (demand side) mempunyai arti yang sama pentingnya dengan ketersediaan pangan pada sisi ketersediaan. Dalam hal ini, keragaman konsumsi pangan atau diversifikasi konsumsi pangan menjadi penting disosialisasikan dikalangan masyarakat, baik di kota dan desa, sehingga tidak bergantung kepada konsumsi pada satu jenis tetapi beberapa jenis pangan yang sebenarnya memiliki nilai kandungan nutrisi yang relative sama atau saling melengkapi.
7. Penganekaragaman/Diseminasi pangan olahan Sebagaimana disebutkan pada unsur ke-6, maka penganekaragaman pangan sangat penting dilakukan untuk menciptakan ketersediaan maupun konsumsi pangan yang beragam, sesuai dengan potensi pangan lokal wilayah. Dengan demikian, semua jenis pangan dihargai dan memiliki nilai nutrisi yang khas dan baik untuk kesehatan manusia dan dibudidaya dalam pola pertanian ramah lingkungan (*good agricultural practice*).
8. Inovasi pangan lokal. Pangan lokal masih memiliki daya saing yang rendah karena belum disentuh oleh teknologi dan inovasi, baik dalam sub-sistem hulu, on farm maupun hilir. Oleh karena itu teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan, perlu diterapkan secara inovatif terhadap pangan lokal sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Hilirisasi pangan lokal merupakan kunci daya saing produk pangan lokal yang ditentukan oleh *prototype* teknologi yang digunakan untuk mengolah pangan lokal dalam berbagai bentuk sesuai dengan permintaan pasar lokal, nasional bahkan global. Penerapan teknologi pengolahan yang terus berkembang merupakan kunci keberhasilan agribisnis produk pangan lokal yang berdaya saing.
9. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa permintaan produk pangan dimasa kini dipengaruhi oleh kualitas pangan dalam bentuk kesehatan



pangan yang bebas dari pengaruh pupuk kimia dan pestisida. Oleh karena itu pengawasan penggunaan bahan kimia untuk pangan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas dan kesehatan produk pangan.

10. Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Lembaga ini memberikan sertifikat jaminan mutu produk pertanian (sesuai dengan komoditas khas di setiap wilayah) sehingga terhindar dari produk pertanian yang tidak sehat seperti berformalin. Lembaga ini penting agar produk tetap sehat mengingat panjangnya tataniaga pemasarannya mulai dari produsen, distributor, penjual buah dan pengecer di pasar. Teknologi pengawasan dan pengecekan di laboratorium merupakan kunci dalam penentuan standarisasi kesehatan produk pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat sehingga tidak mempengaruhi penurunan daya saing dan permintaan pasar.

Semua indikator ketahanan pangan tersebut merupakan satu kesatuan fungsional yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga perlu dilihat dalam perspektif holistik, sistemik dan menyeluruh. Selain itu, data yang terkait dengan indikator-indikator tersebut bersumber dari berbagai instansi yang satu sama lain memiliki otonomi sendiri. Jika demikian, maka Dinas Ketahanan Pangan provinsi Maluku pada hakekatnya tidak memiliki kapasitas menyediakan data ketahanan pangan. Maka peran utama Dinas Ketahanan Pangan (sebelumnya Badan Ketahanan Pangan) adalah melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi lintas OPD/SKPD maupun Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia serta Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.

Oleh karena perannya DKP yang sangat penting itu, maka ketua Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten adalah Gubernur dan Bupati sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai Sekretaris yang menjembatai dan mengkomunikasikan semua hal terkait penyediaan data dan informasi terkait 10 indikator

ketahanan pangan. Pertanyaannya, ketika organisasi Ketahanan Pangan dibentuk menjadi sebuah Dinas teknis, sejauhmana efektifitas perannya dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang dipimpin langsung oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota? Jika tidak, maka peran DKP provinsi maupun kabupaten/kota akan terjebak dalam program dan kegiatan teknis yang kemungkinan menimbulkan program dan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Dinas Teknis, khususnya Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan. Berikut akan didiskusikan penetapan mengenai indikator kinerja DKP provinsi Maluku.

## **7.2 Penetapan Indikator Kinerja DKP Provinsi Maluku**

Penetapan indikator merupakan target pencapaian setiap indikator yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan situasi dan kondisi serta capaian pada tahun-tahun terdahulu. Dalam upaya memahami penetapan kinerja secara sistematis maka perlu dilakukan secara runtut sesuai dengan 10 indikator keberhasilan DKP sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu.

1. Stablisasi harga. DKP menetapkan stabliliasi harga pada tahun 2018 sebesar 35%. Artinya, kemampuan DKP bersama lembaga terkait dalam melakukan stabliliasi harga hanya sekitar 35%, sisanya sebesar 65% ditentukan oleh harga pasar. Pola stabliliasi harga tampak bahwa terjadi kenaikan 5% pertahun sampai tahun 2022. Artinya kemampuna DKP bersama lembaga terkait menstabilisasi harga pangan hanya meningkat sebesar 5% setahun. Pada tahun 2023 diperkirakan stabliliasi harga sudah mencapai 65% bahkan menjadi 85% tahun 2024. Apa argumen dibalik penetapan angka stabliliasi tersebut yang hanya meningkat 5% dalam lima tahun pertama dan kemudian meningkat menjadi 85% pada tahun ke-7, masih dipertanyakan. Namun demikian, hal ini menggambarkan kapasitas DKP dalam

melakukan koordinasi dengan Dinas atau Badan/Lembaga terkait dalam melakukan stabilisasi harga pangan yang sebagian besar masih merupakan pangan impor di provinsi Maluku.

2. Penguatan cadangan pangan ditetapkan pada angka persentase rendah yakni 13% pada tahun 2019 dan meningkat sekitar 1% per tahun sampai tahun 2021, kemudian meningkat sekitar 2%/tahun tahun 2022 dan 2024. Hal ini menggambarkan peran DKP dalam memberikan penguatan terhadap cadangan pangan daerah masih dibawah 21% selama 6 tahun ke depan. Sekali lagi, peran DKP bukanlah seorang diri melakukan penguatan cadangan pangan, tetapi mengkoordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan penguatan cadangan pangan daerah. Berdasarkan angka ini, maka target yang ditetapkan DKP sesungguhnya masih tergolong rendah.
3. Penyediaan peta FSVA ditetapkan 100% tahun 2018, tidak dilakukan pada tahun 2019, tetapi menurun menjadi 75% tahun 2020. Kemudian penyediaan peta tersebut meningkat diatas 85% hingga tahun 2024. Penyediaan peta FSVA cukup tinggi karena program dan kegiatannya dilakukan bersama dengan pemerintah pusat yang melibatkan hampir seluruh provinsi di Indonesia.
4. Penanganan Rawan Pangan Daerah dihitung dalam satuan jumlah Kepala Keluarga yang berhasil dijangkau. Jika diperhatikan dengan seksama, jumlah KK yang ditangani oleh DKP adalah 220 KK pada tahun 2018, kemudian hanya meningkat sebanyak 25-30 KK per tahun sampai tahun 2023. Pertanyaannya, apakah kapasitas DKP hanya mampu menangani rawan pangan sebanyak 25 KK per tahun atau apakah jumlah KK yang tergolong rawan pangan di daerah Maluku memang sekitar 25-30 KK saja per tahun? Bukankah status pangan KK cenderung meningkat seiring



dengan standar kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas yang semakin meningkat pula? Hal ini penting untuk dipertanyakan agar tidak menggunakan standar yang lama untuk mengukur daerah rawan pangan, sebab kebutuhan pangan yang meningkat, baik jumlah dan mutu, akan menimbulkan ukuran baru rawan pangan yang lebih meningkat pula.

5. PPH Ketersediaan Pangan menggambarkan angka 85 dari nilai tertinggi sebesar 100 pada tahun 2018. Jika pada tahun 2018 sudah mencapai angka cukup baik, ternyata selama dua tahun ke depan angkanya tetap, apakah hal ini berarti bahwa tidak ada program dan kegiatan PPH ketersediaan selama 2 tahun kedepan kecuali mempertahankan angka standar lama. Kemudian, hal menarik adalah PPH ketersediaan meningkat hanya satu poin menjadi 86 tahun 2021 dan cenderung tetap selama tiga tahun berikutnya. Jika demikian, maka tugas pokok DKP hanyalah mempertahankan program yang sudah ada tanpa melakukan upaya peningkatan PPH ketersediaan selama tiga tahun berikutnya.
6. PPH Konsumsi mempunyai pola yang sama dengan PPH Ketersediaan dimana pada tahun 2018 mencapai angka 84.5 tetapi cenderung stagnan dua tahun berikutnya, dan bahkan hanya meningkat satu poin selama 4 tahun berikutnya. Apakah PPH Konsumsi sudah mencapai angka maksimum sehingga peningkatan satu poin saja sangat sulit dilakukan setiap tahunnya? Penetapan angka PPH Konsumsi ini penting untuk dievaluasi kembali sehingga tidak terkesan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan selama 5 tahun ke depan hanya berupa business as usual, sekedar mempertahankan angka yang sudah ada, pada hal anggaran dan pembiayaannya kemungkinan meningkat.



7. Penganekaragaman/ Diseminasi pangan olahan ditetapkan sebesar 35 pangan olahan tahun 2018 dan meningkat sebesar 10 jenis pangan olahan per tahun selama 5 tahun berikutnya, kemudian meningkat 20 jenis pangan olahan hingga mencapai 85 jenis pangan olahan tahun 2024. Penetapan kenaikan angka sebesar 10 pangan olahan per tahun tentu didasarkan kepada kemampuan DKP dalam mencapai program dan kegiatan tersebut. Namun demikian, kondisi penetapan angka penganekaragaman pangan olahan yang rendah tahun 2018 dan lima tahun setelahnya tampaknya paradoks dengan tingginya PPH Konsumsi yang tinggi yang sesungguhnya menggambarkan diversifikasi konsumsi pangan.
8. Inovasi Pangan Lokal hanya ditetapkan sebanyak 2 jenis pada tahun 2018, kemudian meningkat sebanyak 2 jenis tahun 2019. Mulai tahun 2020, inovasi pangan lokal cenderung meningkat menjadi 4 hingga 8 tahun 2023 secara gradual, bahkan 10 jenis pada tahun 2024. Banyaknya jumlah inovasi pangan lokal sesungguhnya ditentukan oleh kapasitas DKP dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait, khususnya lembaga penelitian, untuk menghasilkan inovasi pangan lokal yang jauh lebih banyak dihasilkan dari tahun ke tahun.
9. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditetapkan mampu melakukan kinerjanya sekitar 35% tahun 2018 dan hanya dianggap mampu meningkatkan kinerjanya sebesar 10% per tahun selama 5 tahun ke depan, sehingga baru pada tahun 2024 mencapai kinerja sebesar 95%.
10. Penetapan kinerja Kelembagaan OKKPD mempunyai pola yang sama dengan pola pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, yakni meningkat sebesar 10% per tahun, dan capaian kinerja hingga 80% baru dicapai pada tahun ke-5 atau tahun 2023. Pertanyaannya, jika sertifikasi pangan

hanya dicapai sekitar 60% dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, apakah dampak keamanan pangan, atau pangan yang tidak diperiksa kesehatannya, terhadap kesehatan manusia?

### **7.3 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Jika pada bagian terdahulu dijelaskan mengenai penetapan indikator kinerja selama 5 tahun ke depan, maka pada bagian ini akan dipaparkan lebih jauh mengenai rincian indikator kinerja yang lebih terukur (sub-indikator kinerja) selama lima tahun ke depan agar mencapai tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Maluku. Sebagaimana dalam pembahasan terdahulu, maka untuk memahami kinerja DKP secara sistematis maka paparan berikut akan dilakukan berdasarkan 10 indikator dan sub-indikator yang mengikutinya.

1. Indikator stabilisasi harga diukur dengan 5 (lima) sub-indikator, yakni jumlah lumbung pangan (unit), peran Toko Tani Indonesia Maluku Center (TTIMC), pemantauan data harga dan pasokan pangan, analisis harga dan pasokan pangan serta pemantauan Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
  - 1.1. Lumbung pangan berperan penting dalam menyediakan pasokan pangan masyarakat, khususnya pada masa-masa paceklik/kekeringan, sehingga tidak memicu kenaikan harga pangan. Oleh karena lumbung pangan masih terbatas di pedesaan, maka akan disusun program dan kegiatan peningkatan lumbung pangan sebanyak 3 unit per tahun yakni antara tahun 2021 dan 2024, sehingga pada akhir periode RPJMD telah dihasilkan sekitar 12 lumbung pangan atau paling tidak satu lumbung pangan yang efisien dan efektif per kabupaten/kota.

- 1.2. Selain lumbung pangan, upaya menstabilkan harga adalah dengan meningkatkan jumlah Toko Tani Indonesia Maluku Center sebanyak 3 unit per tahun selama periode 2021-2023 sehingga pada setiap kabupaten/kota telah ada satu TTIMC pada akhir periode RPJMD.
  - 1.3. Salah satu masalah serius di wilayah kepulauan adalah sulitnya memantau harga pangan dan pasokan pangan di wilayah pulau-pulau (kecil) yang memiliki berbagai pintu masuk dan keluar. Oleh karena itu, rencana lima tahun ke depan adalah meningkatkan pemantauan harga dan pasokan pangan sebanyak 3 kabupaten/kota per tahun selama periode 2021-2023, sehingga semua kabupaten/kota telah memiliki data harga dan pasokan pangan pada akhir periode RPJMD.
  - 1.4. Analisis Harga dan Pasokan Pangan (AHPP) mempunyai arti penting untuk melihat perubahan harga sekaligus memprediksi harga di bulan-bulan atau tahun berikutnya. Masalahnya, Maluku masih kurang dalam memiliki tenaga analisis dan enumerator dalam pengumpulan data harga dan pasokan pangan di setiap wilayah. Oleh sebab itu, program dalam lima tahun ke depan adalah menyediakan tenaga dan enumerator harga dan pasokan pangan di 11 kabupaten/kota pada akhir periode RPJMD.
2. Penguatan Cadangan Pangan yang diukur dari Cadangan pangan yang disediakan pemerintah (Provinsi/Kabupaten/Kota) belum sesuai dengan harapan karena sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyusun Perda mengenai stok atau cadangan pangan daerah. Cadangan pangan tersebut dapat saja dititipkan di tempat cadangan pangan provinsi atau di tingkat kabupaten/kota. Jumlah cadangan pangan per kabupaten/kota diharapkan meningkat dari 8 ton tahun 2019 menjadi 125 ton pada akhir periode RPJMD sehingga jumlah tersebut mampu menanggulangi gejolak harga dan pasokan pangan pada musim gagal panen atau hari besar agama.



3. Peta FSVA perlu dibuat setiap tahun yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, tetapi tenaga analisis dan operator perlu dipersiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Oleh sebab itu, peta FSVA akan diperbaharui atau di-update setiap tahun selama 5 tahun ke depan sehingga pada akhir RPJMD terdapat petan FSVA yang meliputi data series selama lima tahun terakhir.
4. Penanganan Daerah Rawan pangan diukur dalam lima sub-indikator: (1) Pembinaan Kawasan mandiri Pangan; (2) Pulau Mandiri Pangan; (3) Akses Pangan Masyarakat; (4) Penanganan Daerah rawan Pangan; dan (5) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
  - 4.1. Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan mulai dilakukan di 7 kawasan tahun 2019 dan diharapkan akan diciptakan 7 kawasan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2024, sehingga kawasan mandiri pangan telah ada pada setiap kawasan pada akhir RPJMD.
  - 4.2. Pulau Mandiri Pangan baru dimulai tahun 2019 sebanyak 20 lokasi dan pada akhir tahun RPJMD diharapkan telah mencapai 60 lokasi pulau Mandiri Pangan di provinsi Maluku. Provinsi Maluku membutuhkan kawasan berupa pulau mandiri pangan, sehingga tidak mengalami kesulitan atau tergantung dari pulau lain ketika terjadi kekurangan pangan. Jumlah pulau mandiri pangan yang diharapkan ideal untuk provinsi Maluku yang memiliki ribuan pulau adalah 60 pulau mandiri pangan yang diharapkan tercapai tahun 2024 jika anggaran tersedia.
  - 4.3. Kartu Akses Pangan Masyarakat akan dimulai sebanyak 500 kartu pada tahun 2019 dan diperkirakan akan bertambah sebanyak 500 kartu setiap tahun selama 5 tahun, sehingga pada akhir tahun 2014 telah terpenuhi sebanyak 2500 kartu Akses Pangan Masyarakat. Kartu ini bermanfaat untuk keluarga atau rumah tangga miskin yang masih kesulitan dalam memenuhi pangan keluarga dalam jumlah dan mutu yang memadai karena keterbatasan pendapatan dan kemiskinan.



- 4.4. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) akan meningkat dalam bentuk pemberian bantuan pangan dari 10 lokasi tahun 2018 menjadi 35 lokasi pada akhir tahun 2024 sesuai dengan tujuan RPJMD.
- 4.5. Data SKPG masih terbatas sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk menangani daerah rawan pangan. Oleh karena itu, data SKPG yang masih tersedia sebanyak 1 laporan tahun 2018 akan ditingkatkan ke 20 wilayah berbeda sehingga setiap tahun hingga tahun 2024 (dalam kurun waktu lima tahun ke depan) sehingga menghasilkan laporan tahunan di 20 lokasi setiap tahun sampai tahun 2024 sesuai dengan tujuan RPJMD guna mengantisipasi daerah rawan pangan.
5. Indikator PPH Ketersediaan diukur dari Analisis Ketersediaan Pangan yang akan bermanfaat untuk memantau status nutrisi masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena kendala utama dalam menyusun NBM adalah tenaga analisis maka dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan program menyediakan 30 tenaga ABM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2024.
6. Sub indikator PPH konsumsi adalah Analisis Konsumsi Pangan Penduduk yang masih rendah angka kecukupan gizi di beberapa wilayah. Oleh karena itu DKP akan meningkatkan dua kelompok pangan setiap tahun (khususnya sayur dan buah) selama 5 tahun ke depan untuk memperoleh data analisis konsumsi pangan penduduk, sesuai dengan target dan tujuan RPJMD tahun 2024.
7. Penganekaragaman/Diseminasi Pangan Olahan memiliki 4 (empat) sub-indikator yakni: (1) Pengembangan Usaha dan Industri Pangan Lokal; (2) Pengembangan kreatifitas pengolahan pangan lokal; (3) Peningkatan produksi pangan; (4) Pengembangan kluster pangan lokal.
- 7.1. Lokasi kegiatan sub-indikator pertama masih terbatas karena terbatasnya anggaran, sehingga dalam lima tahun ke depan

akan diprogramkan peningkatan lokasi pengembangan usaha dan industri pangan lokal dari 2 buah tahun 2018 menjadi 25 buah tahun 2024, sesuai dengan RPJMD Maluku.

- 7.2. Pengembangan kreatifitas pangan lokal selama ini terkendala oleh kekuarangan anggaran sehingga baru dimulai sebanyak 4 unit ahun 2019 dan diharapkan meningkat menjadi 50 unit tahun 2024.
  - 7.3. Peningkatan produksi pangan masih terkendala anggaran sehingga hanya direncanakan terjadi kenaikan produksi sekitar 5% petahun selama 5 tahun ke depan.
  - 7.4. Klaster atau kawasan industri pangan belum ada dibangun pada tahun 2018, tetapi direncanakan akan membangun klaster pangan sebanyak 3 unit tahun 2019 dan diharapkan meningkat menjadi 6 unit pada setiap tahun hingga tahun 2024, sehingga setiap kabupaten/kota telah memiliki klaster pangan lokal.
8. Inovasi Pangan lokal diukur dari lima indikator, yakni: (1) Festival pangan lokal B2SA; (2) Gerakan optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga; (3) Operasional Obor pangan lestari; (4) Gerakan sehari tanpa nasi; dan (5) Gelar pangan lokal nusantara.
- 8.1. Lomba pangan B2SA merupakan lomba cipta menu yang kemudian dikembangkan menjadi Festival Pangan Lokal B2SA tetapi baru dihasilkan dalam bentuk laporan buku resep. Jumlah peserta tahun 2019 adalah 500 orang dan diharapkan akan melibatkan 500 peserta setiap tahun selama 5 tahun hingga 2024 sesuai dengan tujuan RPJMD
  - 8.2. Gerakan optimalisasi lahan pekarangan baru dimulai tahun 2019 sebanyak 10 persen tetapi diharapkan akan meningkat antara 15 sampai 25 persen per tahun sehingga telah mencapai 100% pada akhir 2024 sesuai dengan tujuan RPJMD.
  - 8.3. Obor Pangan Lestari merupakan program nasional ang direncanakan dilakssanakan setiap tahun atau 5 kali selama 5 tahun sesuai dengan periode RPJMD.

- 8.4. Gerakan sehari tanpa nasi dilakukan sekali setahun selama lima tahun ke depan (2019-2023) tetapi belum didukung oleh rrgulasi pemerintah provinsi dan kabupetn/kota. Jika setiap tahun dilakukan gerakan sehari tanpa nasi dan didukung oleh regulasi pemerintah, maka pangan lokal akan lebih berkembang karena didukung oleh permintaan konsumsi masyarakat.
- 8.5. Gerakan pangan nusantara akan dilakukan setiap tahun selama lima tahun ke depan yakni dengan mempromosikan pangan lokal di tingkat nasional, sehingga pangan Maluku semakin dikenal (dan mungkin disukai) pada tingkat nasional.
9. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan diukur dari dua sub-indikator yakni pengawasan mutu dan keamanan pangan segar serta sosialisasi promosi kemanana pangan segar.
  - 9.1. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar belum dilakukan pada semua kabupaten/kota, sehingga pada tahun 2019 dimulai satu pengawasan pada setiap kabupaten/kota. Lima tahun berikutnya, jumlah pengawasan akan ditingkatkan menjadi rata-rata 2 kali pelaksanaan pengawasan pada setiap/kabupaten/kota sehingga terpantau masalah kemananan pangan pada semua kabupaten/kota sesuai target RPJMD 5 tahun ke depan.
  - 9.2. Sosialisasi keamanan pangan segar akan dilakukan sebanyak 5 kali setiap tahun selama lima tahun ke depan atau sekitar 30 kali pada akhir periode RPJMD. Sosialisasi dimaksud diharapkan akan dilakukan pada setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Maluku.
10. Kelembagaan OKKPD diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator, yakni: (1) Penguatan kelembagaan keamanan pangan; (2) Akselerasi OKKPD Maluku; (3) Kerjasama antar lembaga/instansi pengawasan keamanan pangan tingkat provinsi; (4) Peningkatan kompetensi petugas/SDM keamanan pangan melalui inhouse training.



- 10.1. Penerbitan sertifikat akan dilakukan setiap tahun, yakni satu sertifikat kelembagaan keamanan pangan per tahun, selama lima tahun ke depan, atau 5 sertifikat pada akhir tahun 2024
- 10.2. Akselerasi OKKPD akan dilakukan sekali setiap tahun selama lima tahun ke depan karena keterbatasan anggaran sehingga akan terwujud 5 kali akselerasi untuk mendukung OKKPD Maluku
- 10.3. Hubungan terintegrasi antar lembaga akan dilakukan sebanyak lima lembaga setiap tahun selama lima tahun ke depan sehingga terwujud sekitar 25 kali interaksi dan integrasi lintas lembaga pada akhir tahun 2024.
- 10.4. Inhouse training akan dilakukan sebanyak 10 kali per tahun selama lima tahun kedepan sehingga mencapai 50 kali pada akhir periode RPJMD tahun 2024.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang dipaparkan pada bagian terdahulu mengandung sejumlah komponen/ indikator disertai sub-indikator yang cukup kompleks, tetapi relevan dengan kebutuhan pembangunan ketahanan pangan Maluku yang mandiri dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Diantara 10 indikator yang ditetapkan, satusama lain saling terkait secara fungsional sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, program-program ketahanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi saling terintegrasi dengan indikator lainnya. Jika ketersediaan terbatas, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas harga. Demikian pula jika diversifikasi konsumsi tidak akan berjalan baik jika tidak diawali dengan diversifikasi ketersediaan pangan. Posisi tawar petani tidak akan kuat jika tidak diberdayakan dari aspek kelembagaan maupun harga jual yang menguntungkan. Demikian halnya dengan konsumen tidak akan memperoleh manfaat berupa pangan yang aman dan sehat jika praktek pertanian yang baik tidak diterapkan oleh petani. Tidak kalah pentingnya adalah analisis terhadap kondisi pangan, baik berupa neraca bahan makanan maupun pembuatan peta rawan pangan yang



dilakukan secara berkala pada setiap kawasan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah berbasis kepada hasil kajian.



Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun	Kondisi Akhir Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stabilisasi Harga	Dok	35	40	45	50	55	65	85
2	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	2,9	8,7	15	20	25	30	35
3	Peta FSVA	Dok	100	-	75	100	85	90	100
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	KK	220	250	275	300	325	350	400
5	PPH Ketersediaan	Skor	85	85	85	85	85	85	85
6	PPH Konsumsi	Skor	84.6	86	86.5	87	87.5	88	87
7	Penganekaragaman/Deseminasi Pangan Olahan	Jenis	35	40	45	50	55	65	85
8	Inovasi Pangan Lokal	Unit	2	2	4	5	7	8	10
9	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	35	45	55	65	75	85	95
10	Kelembagaan OKKPD	%	30	40	50	60	70	80	90

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

No	Indikator Program		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Distribusi dan Cadangan Pangan</b>	Lumbung Pangan	Lumbung	Masih kurangnya Lumbung Pangan Masyarakat yang tersedia dan kurangnya pemantauan ke kelompok		-	3	3	3	3	
		Toko Tani Indonesia Maluku Center (TTIMC)	(toko)	Masih terjadinya fluktuasi harga pada momen-momen tertentu terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)		-	3	3	3	3	
		Pemantauan Data Harga dan Pasokan Pangan	(daerah)	Belum terpantaunya kondisi harga dan pasokan pangan di 11 Kab /Kota secara teratur dan berkelanjutan		-	11	11	11	11	

		Analisis Harga dan Pasokan Pangan	(daerah)	Belum tersedianya tenaga enumerator dan tenaga analisis yang permanen dan terampil di 11 Kab/Kota		11	11	11	11	11	
		Pemantauan HBKN	(HKBN)	Masih terjadinya fluktuasi harga pada momen-momen tertentu terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)		-	2	2	2	2	
		Cadangan Pangan Pemerintah	(ton beras)	Belum tersedianya alokasi cadangan pangan provinsi sesuai regulasi yang berlaku		15	20	25	30	35	
<b>2.</b>	<b>Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</b>	Peta Daerah Rawan Pangan (FSVA)	(unit)	Untuk penyelesaian buku FSVA dan data2 yang dibutuhkan harus terupdate setiap tahunnya bagi petugas analisis dan operator	1	1	1	1	1	1	



		Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan	(lokasi)	Belum meratanya pembinaan dan Bantuan di setiap kawasan	-	7	7	7	7	7	
		Pulau Mandiri Pangan	(pulau)	Belum terpenuhinya anggaran sehingga dalam pengembangan Pulau Mandiri Pangan tidak merata	-	2	3	4	5	6	
		Akses Pangan Masyarakat	(daerah)	belum tersedianya Anggaran sehingga Kartu Akses belum dilaksanakan	-	1	3	6	9	11	
		Penanganan daerah rawan pangan	(lokasi)	Belum semua kabupaten yang mendapat bantuan PDRP	5	5	5	5	5	5	
		Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	(kegiatan)	Tersedianya data analisis yang dapat digunakan dalam penanganan daerah rawan pangan	1	1	1	1	1	1	
		Analisis Ketersediaan Pangan	(lokasi)	Masih kurangnya petugas NBM di Kabupaten/Kota	-	12	12	12	12	12	

3.	<b>Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</b>	Analisis Konsumsi Pangan Penduduk	(kegiatan)	Beberapa kelompok pangan hasil analisis pola konsumsi dan PPH memperlihatkan masih kurangnya angka kecukupan gizi dan nilai skornya	-	1	1	1	1	1	
		Pengembangan Usaha dan Industri Pangan Lokal	(kelompok)	Belum tersentuhnya seluruh lokasi kegiatan yang sudah direncanakan dikarenakan adanya pemotongan anggaran	2	4	10	15	20	25	
		Pengembangan Kreativitas Pengolahan Pangan Lokal	(kelompok)	Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	-	4	20	30	40	50	
		Peningkatan Produksi Pangan	(kelompok)	belum adanya anggaran dalam pengembangan pangan lokal	-	5	5	5	5	5	
		Pengembangan Cluster Pangan Lokal	(kelompok)	belum tersedianya Calster - calster pangan lokal di	-	3	6	6	6	6	

				11 Kab/Kota							
		Festival Pangan Lokal B2SA	(kegiatan)	Lomba Cipta Menu berubah menjadi Festival Pangan Lokal B2SA sehingga masih dalam bentuk laporan buku resep	1	1	1	1	1	1	
		Gerakan Optimalisasi Lahan Pekarangan Rumah Tangga	(kelompok)	Belum dilakukan gerakan optimalisasi lahan pekarangan melalui integritas program	-	10	15	20	25	30	
		Operasional Obor Pangan Lestari (OPAL)	(kegiatan)	Masih Dalam Pelaksanaan Kegiatan Obor Pangan Lestari yang di Anggarkan oleh APBN	-	1	1	1	1	1	
		Gelar Pangan Lokal Nusantara /Gerakan Sehari Tanpa Nasi (One Day No Rice)	(kegiatan)	Belum ada regulasi Provinsi dan belum ada review keputusan Gubernur dalm	-	1	1	1	1	1	
<b>4.</b>	<b>Keamanan Pangan</b>	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	(daerah)	Belum terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar di	11	11	11	11	11	11	

				seluruh kab/kota dikarenakan kurangnya anggaran							
		Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar	(kegiatan)	Belum tersosialisanya tentang keamanan pangan yang segar dengan baik	11	11	11	11	11	11	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	(kegiatan)	Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan keamanan pangan sehingga minimnya penerbitan sertifikat	-	1	1	1	1	1	
		Akselerasi OKKPD Maluku	(kegiatan)	Belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan OKKPD di Maluku	-	1	1	1	1	1	
		Kerjasama Antar Lembaga/Instansi Pengawasan Keamanan Pangan Tingkat Provinsi	(kegiatan)	Belum terciptanya hubungan kerjasama yang berintegrasi antara lembaga/instansi terkait	1	2	2	2	2	2	



		Peningkatan Kompetensi Petugas/SDM Keamanan Pangan Melalui INHOUSE TRAINING	(kegiatan)	Belum dilakukannya kegiatan ini karena tidak ada dukungan anggaran	-	1	1	1	1	1	
--	--	---	------------	--	---	---	---	---	---	---	--



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Disadari bahwa provinsi Maluku yang berciri kepulauan, dimana sistem transportasi antarpulau masih sulit, maka konektivitas antarpulau sangat penting dilakukan sehingga transportasi dan distribusi pangan lebih murah dan mudah. Selain itu, pendekatan Gugus Pulau penting dilakukan, baik dalam bentuk kluster industri maupun hilirisasi pangan pada setiap pulau sehingga kemandirian pangan pada tingkat pulau atau sering disebut Pulau Mandiri Pangan, menjadi embrio yang mampu mendukung kemandirian pangan pada tingkat Gugus Pulau. Dengan demikian, rencana lima tahun ke depan merupakan titik tolak mengembangkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dimana Maluku dapat menjadi model bagi daerah-provinsi lain.

Implementasi program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra ini dimulai tahun 2019 dan berakhir tahun 2024. Segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan tentu akan dikerahkan dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Maluku selama periode 2019 – 2024. Setiap tahun Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas sebagai langkah operasional kegiatan dan anggaran tahunan.

Kinerja setiap tahun yang diukur dari beberapa indikator utama akan menjadi tolok ukur tingkat kesesuaian antara rencana dan hasil yang dicapai. Besarnya persentase capaian atau kinerja dari angka yang ditargetkan akan memberikan gambaran tentang seberapa baik kinerja Dinas dalam merealisasikan program dan anggaran. Secara keseluruhan, selama lima tahun, akan nampak bagaimana kualitas kinerja Dinas dalam menjalankan misi baik pada level OPD maupun pada level kabupaten.

Disadari bahwa keterbatasan yang ada pada Dinas, baik keterbatasan dari segi SDM aparatur, sarana & prasarana yang dimiliki, dan anggaran, kesemuanya secara langsung atau tidak langsung menentukan hasil akhir (output) dari Renstra ini. Untuk itu, dukungan dari internal Dinas sendiri dan dari OPD terkait lainnya sangat diperlukan.



